



LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN ANGGARAN 2021

**Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2021 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan Bidang Pemberantasan selama Tahun 2021, berkaitan dengan pelaksanaan P4GN Bidang Pemberantasan.

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh personil, seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia. Namun demikian dengan beban tugas yang semakin meningkat, kami menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil Deputy Bidang Pemberantasan.

Kepada seluruh personil Deputy Bidang Pemberantasan dimanapun anda berada yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun kontribusi bentuk lainnya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2022

Plt. Deputy Pemberantasan BNN

Drs. Kenedy, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	2
I.3 Kedudukan dan Fungsi.....	3
I.4 Peran Strategis.....	4
I.5 Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	8
II.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberantasan 2021.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BID. PEMBERANTASAN	
III.1 Capaian Kinerja	14
III.2 Analisa capaian indikator kineja utama tahun 2021.....	16
III.3 Capaian kinerja masing masing Direktorat	35
III.3.1 Direktorat Intelijen	35
III.3.2 Direktorat Narkotika	58
III.3.3 Direktorat Psicotropika dan Prekursor	71
III.3.4 Direktorat TPPU	81
III.3.5 Direktorat Interdiksi	92
III.3.6 Direktorat Penindakan Pengejaran.....	100
III.3.7 Direktorat Wastahti	115
III.4 Akuntanbilitas Keuangan	140

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan.....	144
IV.2. Saran.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Deputi Bidang Pemberantasan adalah salah satu satuan kerja tingkat eselon I pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sementara itu tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN.

Arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2020-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan permasalahan narkotika secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkotika secara holistik, integral dan berkelanjutan.

3. Mengedepankan profesionalisme , dedikasi dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan yaitu Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.

I.2 DASAR HUKUM

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan prekursor narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Narkoba Nasional;
7. Rencana Kerja Bidang Pemberantasan T.A. 2021;
8. Perjanjian Kinerja Deputi Pemberantasan tahun 2021.

I.3 KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Deputi Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Deputi.

Deputi Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 144 yaitu melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

2. Fungsi

Deputi Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 145, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset.
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- d. Pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan, dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

I.4 PERAN STRATEGIS

Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba, peran strategis Deputi Bidang Pemberantasan adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional.

Deputi Bidang Pemberantasan sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba khususnya di bidang pemberantasan mempunyai strategi-strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain :

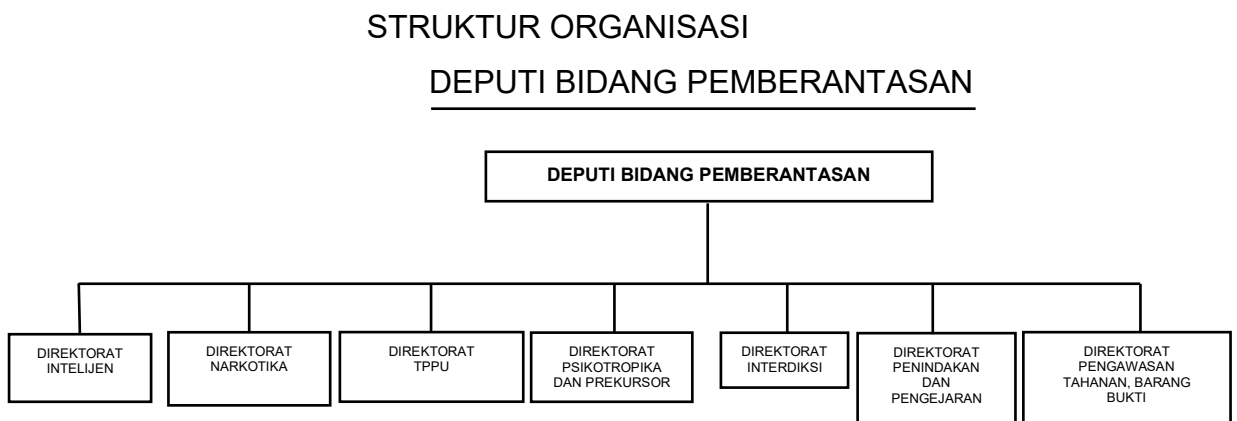
1. Melakukan pembangunan dan pengembangan kemampuan intelijen yang berbasis pada *Human Intelligence* dan Teknologi Intelijen.
2. Memberantas Sindikat Jaringan Narkoba
3. Melakukan pengawasan penggunaan prekursor narkoba secara ketat.

4. Melakukan Interdiksi Udara, Laut, dan Perbatasan
5. Melakukan pengawasan tahanan, barang bukti, dan penyitaan aset jaringan sindikat narkoba.
6. Melakukan penelusuran aset.
7. Melakukan penindakan dan pengejaran

Melalui penerapan strategi tersebut di atas diharapkan akan dapat menekan laju pertumbuhan angka prevalensi, menekan *demand*, dan menghentikan suplai.

I.5 STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Deputy Bidang Pemberantasan terdiri atas :
 - a. Direktorat Intelijen
 - b. Direktorat Narkotika
 - c. Direktorat Prekursor Psikotropika
 - d. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
 - e. Direktorat Interdiksi
 - f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran
 - g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset



2. Tugas masing-masing Direktorat di bawah Deputy Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut :
 - a. Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.
 - b. Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berasal dari tanaman.
 - c. Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor narkotika.

- d. Direktorat Tindak Pidana Uang (TPPU) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang merupakan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; dan b. pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- e. Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah udara, laut, perairan, darat, dan lintas batas.
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan tahanan, barang bukti dan penyitaan aset.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan Kinerja juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional. Manfaat Perencanaan Kinerja salah satunya adalah menghubungkan perencanaan strategis, perencanaan tindakan, maupun perencanaan operasional secara rinci.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan penjabaran yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategi, target, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024. Deputi Bidang Pemberantasan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), bertujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara nasional, tujuan tersebut salah satu sasaran strategis yang terkandung di dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pemberantasan TA. 2021. menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (demand side) , meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah dan pelaksanaan kegiatan Intelijen Narkoba.

II.2 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2021

Target kinerja eselon I atau tingkat kedeputian merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat kelembagaan BNN. Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon I atau kedeputian sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon I atau kedeputian

Indikator Kinerja	Target kinerja		
	2019	2020	2021
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	29 Jaringan	29 Jaringan	35 Jaringan
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100 %	100 %	100%

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	35 Jaringan
		Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100 %
2.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	47 Peta jaringan
3	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	563 Berkas Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	13 Titik lokasi
4	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba pada	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan	60 Berkas perkara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	T a r g e t
	wilayah entri point udara ,laut,darat dan lintas batas wilayah Indonesia	laut,perairan da lintas batas wilayah indonesia yang P-21	
5	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika ,prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100 %
		Persentase target operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100 %
6	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas Perkara
		Jumlah importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkotika non farmasi yang diawasi	28 Perusahaan
		Jumlah pengungkapan kasus tidak pidana psikotropika	10 Lap
7	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana	22 Berkas perkara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	T a r g e t
	pidana narkoba dan prekursor narkoba	narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	
8	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100

Jumlah Anggaran :

Sesuai Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2021 anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 212.713.534.000-** (dua ratus dua belas milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

dengan perincian sebagai Berikut :

Tabel 2.1

Alokasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Nasional

NO.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi	59.733.606.000	
2.	Penyidikan jaringan peredaran gelap Narkoba	21.951.220.000	
3.	pelaksanaan interdiksi wilayah Udara,Laut, darat dan lintas batas	29.000.000.000	

NO.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
4.	penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan Prekursor	Rp.6.898.530.000	
5.	penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Rp.19.303.461.000	
6.	pelaksanaan penindakan dan pengejaran	Rp.64.557.863.000	
7.	pengawasan Tahanan dan Barang bukti	Rp.5.228.834.000	
8.	Dukungan Manajemen	Rp. 6.040.020.000	
TOTAL		Rp. 212.713.534.000	

Dengan distribusi anggaran :

Distribusi Anggaran Pusat : 150.943.528.000

Distribusi Anggaran Ke BNNP :

INTELIJEN : Rp. 6.100.000.000

WASTAHTI : Rp. 11.703.623.000

TPPU : Rp. 3.360.000.000

Narkotika : Rp. 40.606.383.000

Total : Rp. 61.770.006.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BID. PEMBERANTASAN

III.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2021 Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai 2 Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 7 Indikator Kinerja Utama (*outcome*). Ketujuh indikator kinerja tersebut telah terealisasi dan bahkan capaiannya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pemberantasan
Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi
1	Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	88 Jaringan
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	122 %
2.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	88 Peta jaringan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi
3	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1076 Berkas Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	18 Titik lokasi
4	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara ,laut,darat dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan da lintas batas wilayah indonesia yang P-21	76 Berkas perkara
5	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika ,prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	128 %
		Persentase target operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	242 %
6	Meningkatnya pengawasan distribusi	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	26 Berkas Perkara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi
	psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkotika non farmasi yang diawasi	28 Perusahaan
		Jumlah pengungkapan kasus tidak pidana psikotropika	11 Lap
7	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	23 Berkas perkara
8	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100

III.2 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui

bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampaui.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Deputy Bidang Pemberantasan tahun anggaran 2021, Pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan BNN tahun 2021 dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap	35 Jaringan	88 Jaringan	251 %

Jaringan sindikat narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) baik individu maupun kelompok yang melakukan perencanaan dan aktivitas ilegal yang terjadi di lebih dari satu wilayah atau negara. Salah satu bentuk *Organized Crime* ini adalah perdagangan Narkoba (*National Institute of justice, 2007*). Aktivitas perdagangan narkoba terdapat di lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Adapun karakteristik *Organized Crime* adalah dengan membentuk sebuah jaringan dalam melakukan aktivitas kejahatan.

Dalam konteks indikator kinerja ini, bahwa yang dimaksud dengan Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang

terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain penyandang dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar, dan kurir yang berhasil diungkap.

Tahun 2021 Jumlah sindikat narkoba yang berhasil dipetakan sebanyak 88 peta jaringan dan yang berhasil ditindak lanjuti / diungkap jaringannya 88 peta jaringan dan kasusnya sudah diproses hukum dan dibuatkan Laporan Kasus Narkoba (LKN) dan Laporan Polisi (LP). Dalam pengungkapan target jaringan tersebut ditemukannya hubungan dengan beberapa jaringan yang sudah dipetakan sehingga realisasinya jaringan yang dapat diungkap sebanyak 88 Peta jaringan yang terdiri dari 27 Jaringan Internasional dan 61 jaringan nasional. Dengan perincian sebagai berikut :

JARINGAN INTERNASIONAL	JARINGAN NASIONAL
<p>Golden Triangle</p> <p>Terdiri dari jaringan sindikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Malaysia Aceh 2. Malaysia Sumut 3. Malaysia Kepri 4. Malaysia Riau 5. Malaysia Kaltara 6. Malaysia Kalbar 7. Thailand Aceh <p>Golden Crescent</p> <p>Pakistan aceh</p>	<p>TERDIRI DARI JARINGAN SINDIKAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh 2. Madura 3. Jawa 4. Jakarta Raya 5. Sulawesi 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. NTT 9. Bali 10. Sumatera 11. Banten

Metode pengukuran jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah tersangka dalam satu jaringan sindikat yang terungkap.

2. Peran dari masing-masing tersangka yang tertangkap dalam satu jaringan sindikat.
3. Modus operandi yang digunakan oleh jaringan.
4. Alur transaksi keuangan hasil tindak pidana narkoba.
5. Jenis narkoba yang berhasil disita.
6. Hubungan komunikasi antar person jaringan
7. Adanya anatomi jaringan sindikat narkoba.
8. Hasil pengungkapan jaringan sindikat narkoba direalisasikan dalam Laporan Kasus Narkoba (LKN) atau Laporan Polisi (LP).

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama yaitu:

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah jaringan sindikat kejahatan Narkoba yang terungkap	$= (\sum RJSKN / \sum TJSKN) * 100\%$	$= (88/35) * 100\%$ $= 251,42\%$	- $\sum RJSKN$ = Jumlah Realisasi Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba - $\sum TJSKN$ = Jumlah Target Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba

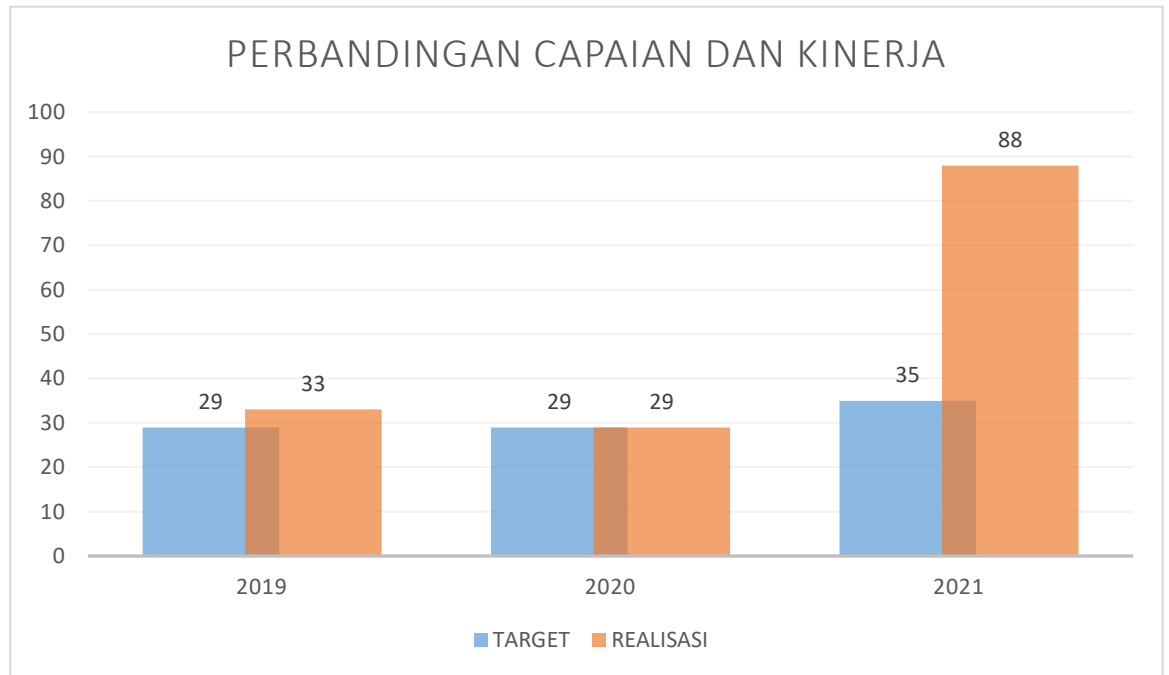
Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 100 %. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi jaringan sindikat kejahatan narkoba yang berhasil diungkap sejumlah 88 jaringan dengan target jaringan sindikat kejahatan narkoba yang akan diungkap sejumlah 35 jaringan dikalikan 100%.

Pencapaian yang melebihi target tersebut karena adanya kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama Bilateral dengan *agency* internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, koordinasi dan komunikasi personil antara pusat dan daerah dalam pemetaan jaringan/pengungkapan jaringan terhadap target yang sudah ditetapkan dapat terorganisir dengan baik serta personel intelijen tingkat pusat dan daerah mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba skala

internasional /nasional Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik III.1

Jumlah Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba yang Terungkap



Jika dibandingkan capaian setiap tahun maka akan terlihat data seperti berikut. Pada tahun 2019 perbandingan antara target dan realisasi adalah 113,79%, 2020 perbandingan antara target dan realisasi adalah 100%, dan di tahun 2021 perbandingan antara target dan realisasi adalah 251,42%. terjadi peningkatan persentase capaian di 2021 hal ini terjadi juga pada jumlah hasil capaian pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap dengan realisasi dua tahun sebelumnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN.

2. Terjalannya kerjasama yang lebih baik antar penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *sharing* informasi jaringan sindikat narkoba.
3. Komitmen yang kuat dari petugas pelaksana lapangan dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan secara profesional.
4. Koordinasi yang semakin baik antara BNN Pusat dengan BNN Provinsi maupun aparat penegak hukum lainnya.
5. Laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti oleh aparat BNN.
6. Kesigapan petugas dalam pengungkapan jaringan narkoba.

Sedangkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan adalah:

1. Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih sangat tergantung akan teknologi intelijen yang ada di pusat.
2. Terbatasnya SDM khususnya di BNNP dan BNN Kab./Kota yang mempunyai keahlian di bidang narkoba, khususnya punya kualifikasi bidang analisis Intelijen dalam kegiatan pengumpulan data jaringan sindikat narkoba.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah, kurangnya persamaan pemahaman dalam pemetaan jaringan sindikat narkoba, sehingga capaian target kurang maksimal.
4. Peralatan Bantuan Teknologi Intelijen sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengcover kegiatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba yang ada di daerah.
5. Pola komunikasi dari para pelaku yang menggunakan sarana media sosial (medsos) dan kemampuan peralatan di BNN belum *support* terhadap pemantauan Media Sosial yang mengakibatkan jaringan sindikat narkoba kurang termonitor dengan maksimal.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Langkah antisipatif atau rekomendasi ke depan yang akan diambil adalah:

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana teknologi Intelijen yang ada untuk mendukung kegiatan BNNP dan BNN Kab/kota.
2. Perlu peningkatan jumlah personil yang bertugas dalam penanganan intelijen.
3. Perlu peningkatan kemampuan tenaga analis intelijen dengan memberikan pengarahan tugas, pelatihan teknis analis atau bimbingan teknis (Bimtek) dan pemetaan jaringan.
4. Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang intelijen.
5. Meningkatkan koordinasi antara penyelidik dan penyidik dan antar aparat penegak hukum lainnya di luar BNN.
6. Perlu optimalisasai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam setiap pelaksanaan tugas operasional.

Bentuk efisiensinya adalah *support* data hasil analisis jaringan narkoba yang ada di BNNP akan dikembangkan oleh personil di BNN, kemudian jika sudah siap dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna pemutusan sel jaringan sindikat narkoba, dengan demikian keterbatasan sumber daya manusia terbantu dengan ketersediaan sarana teknologi intelijen sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagian Jaringan Sindikat narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2021 merupakan jaringan sindikat narkoba baru dan tidak ada kaitan dengan jaringan narkoba yang berhasil diungkap pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba merupakan berkas tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana asal narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dan dilakukan penyidikan, setelah

dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti yang kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Pengukuran berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 adalah perbandingan kasus perkara dengan target berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang masih dalam penyidikan.

Adapun hasil pengukuran berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21, sebagai berikut:

1. Jumlah kasus TPPU yang ditangani selama tahun 2021 adalah 27 berkas.
2. Kasus TPPU yang sudah P21 hingga berakhirnya tahun 2021 adalah 27 berkas dari 22 berkas yang menjadi target tahun 2021.
3. Maka persentase penanganan kasus adalah persentase keberhasilan yang sudah P21 dibandingkan dengan jumlah kasus TPPU yang ditangani adalah: $27/22 \times 100 = 122\%$.

Formula yang digunakan untuk mengukur berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	$= (\text{Jumlah TPPU P21} / \text{Jumlah TTPPU P21}) * 100\%$	$= (27/22) * 100\%$ $= 122\%$	- Jumlah TPPU P21 = Jumlah Realisasi berkas perkara TPPU yang sudah P21 - Jumlah TTPPU P21 = jumlah Target berkas perkara TPPU.

Data yang didapatkan terkait realisasi target pengungkapan TPPU Narkotika sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	22	27	122 %

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021, dari sisi kuantitas penanganan kasus terdapat penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari capaian kinerja pada akhir tahun terdapat peningkatan yang signifikan pada keberhasilan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Berikut perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik III.2

Perbandingan penanganan berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 Tahun 2019 , Tahun 2020 & Tahun 2021



Adapun penjelasan pada grafik perbandingan di atas adalah sebagai berikut:

1. Capaian target berkas perkara yang terselesaikan dan atau P-21 Tahun 2019 sebesar 100%, pada 2020 dengan hasil akhir 61% dan di tahun 2021 ini sebesar 122%. Pada tahun 2021 Deputi Bidang Pemberantasan mampu melampaui target yang telah ditentukan.
2. Setelah melaksanakan rekomendasi dengan melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi atau Pendampingan Penanganan kasus kepada penyidik BNN Provinsi oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang maka adanya peningkatan penanganan berkas tindak pidana pencucian uang, dimana target yang diberikan pada Tahun 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) berkas dengan capaian (berkas P-21) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas.

Meskipun capaian tahun 2021 telah melebihi dengan target akan tetapi masih butuh perhatian di beberapa bidang diantaranya :

1. Pengembangan penelusuran aset tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari narkoba memerlukan waktu yang sangat panjang guna pengembangan aset tersangka sehingga untuk pencapaian target penanganan berkas perkara P-21 tidak dapat dipaksakan harus selesai dalam tahun anggaran berjalan;
2. Masih minimnya kuantitas dan kualitas penyidik pada BNN dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba;
3. Belum meratanya pemahaman penyidik yang ada di BNN terkait dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba;
4. Belum adanya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.

Sebagai tindak lanjut dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja pada tahun 2021 untuk melemahkan jaringan peredaran gelap narkoba Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Merekomendasi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada di kewilayahan;
2. Mengusulkan penambahan tenaga penyidik khususnya penyidik POLRI dan penyidik ASN yang telah mempunyai kompetensi dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memaksimalkan penyidik BNN;
3. Perlu Pelatihan dan Pembinaan lanjutan kepada penyidik, baik yang berada di pusat maupun di kewilayahan tentang penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang secara berkala;
4. Penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan penyidik di kewilayahan masih perlu pendampingan dari BNN Pusat;
5. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perbankan, non perbankan maupun instansi terkait lainnya guna menyatukan pemahaman dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba.
6. Dibutuhkannya sistem informasi yang terintegrasi terkait penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba

Selain apa yang dilaksanakan pada tahun 2021, pada periode 2015 sd 2020 Deputi Bidang Pemberantasan melakukan modernisasi peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya. Bentuk modernisasi yang dilakukan dengan membeli peralatan baru dan melakukan pembangunan fasilitas secara terbatas. Untuk kategori pembangunan terbatas, telah dilaksanakan pembangunan pusat komando interdiksi terpadu dan pos komando yang berada di 7 provinsi. Dimasa depan

keberadaan pos komando akan ditingkatkan sehingga mencapai jumlah ideal yang mampu melakukan pengawasan di wilayah NKRI. Terdapat beberapa jenis dan unit peralatan yang telah didistribusikan ke kantor wilayah untuk dipergunakan oleh bidang pemberantasan. Peralatan yang dimaksud adalah: *Mobile Incenerator* (4 unit), *Mobile Direction Finder* (3 unit), *Portable Narcotic Detector* (34 unit), *mobilephone data extractor* (30 unit), *mobile x-ray*. Seluruh peralatan yang dikirim harus diakui ada yang masih beroperasi dengan baik dan ada yang sudah mendekati umur pakai peralatan. Sebagai ilustrasi untuk peralatan elektronik yang dibeli pada tahun 2016 akan habis umur pakai pada tahun 2021, implikasinya harus diadakan pembelian peralatan yang berkesinambungan dengan memperhatikan aspek waktu. Selain aspek usia peralatan, jumlah masih belum memadai, perlu ditingkatkan lagi jumlah peralatan yang didistribusikan ke kantor wilayah.

Unit K-9 pada tahun 2019 memiliki struktur organisasi yang berada pada Deputi Bidang Pemberantasan, tidak seperti ketika pertama kali diadakan pada tahun 2016 masih berupa kelompok kerja. Capaian dari unit kerja K-9 dapat dikatakan meningkat seiring berjalannya waktu. Kemampuan personil pawang dalam pengalaman operasi serta kemampuan satwa itu sendiri. Salah satu keberhasilan yang dapat diapresiasi adalah program penangkaran satwa. Dengan fasilitas yang sangat terbatas dan bahkan dapat dikatakan sangat kurang. Para dokter di unit K-9 mampu menangkarkan satwa K-9. Pada tahun 2019 ada 10 ekor anak anjing yang lahir dari indukan milik BNN. Dimasa depan dibutuhkan peralatan yang mampu mendukung program penangkaran dari aspek perawatan dan pelatihan satwa. Pada tahun 2020 dilakukan penambahan satwa K-9 sebanyak 25 Ekor yang bersumber pada APBN. Diharapkan dengan adanya penambahan unit akan meningkatkan kinerja dan keberhasilan tugas. Harapan bagi unit K-9 adalah meningkatnya fasilitas pelatihan dan

fasilitas Kesehatan Hewan sehingga memiliki taraf Nasional di masa depan.

Rumah tahanan BNN sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara berurutan sebagai berikut : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.02.01 tahun 2012 Tentang Tempat Tahanan Badan Narkotika Nasional Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Cabang Rumah Tahanan Negara Cipinang, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.04.OT.01.02 tahun 2015 tanggal 06 Juli 2015 Tentang Tempat Tahanan Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-08.OT.01.03 tahun 2020 Tentang Tempat Tahanan pada Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan) sehingga sampai tahun 2020 BNN mengoperasikan 20 cabang Rutan. Akan tetapi masih banyak terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan jumlah kantor BNNP yang berada di seluruh Provinsi. Idealnya setiap kantor BNNP memiliki cabang rutan yang ditetapkan oleh kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2021, dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 BNN telah melakukan berbagai operasi bersama dengan instansi terkait. Telah dilakukan 199 kali operasi bersama dengan instansi pemerintah terkait baik pada level BNN RI maupun pada BNNP. Dengan data sebagai berikut :

Tabel III.3
Rekapitulasi Pelaksanaan Operasi Bersama Dalam Rangka Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN

No	SATUAN KERJA	TNI	POLRI	KKP	KPLP	BAKAMLA	BNPP	IMIGRASI	DJPAS	DJBC	POS/EKPEDISI	RA	ANGKASAPURA	PEMDA	KEMANTAN	KLHK	KEJAKSAANRI	BRI	BIG	LAPAN	REKAP
1	INTERDIKSI	0	1	1	1	1	1	1	1	9	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2	NARKOTIKA	6	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6	2	6	1	2	2	43
3	DAKJAR	1	4	1	0	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Kepulauan Bangka Belitung	1	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12

No	SATUAN KERJA	TNI	POLRI	KKP	KPLP	BAKAMLA	BNPP	IMIGRASI	DJPAS	DJBC	POS/EKPEDISI	RA	ANGKASA PURA	PEMDA	KEMENTAN	KLHK	KEJAKSAAN RI	BRI N	BIG	LAPAN	REKAP
12	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jawa Timur	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
20	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
21	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Kalimantan Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
24	Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

No	SATUAN KERJA	TNI	POLRI	KKP	KPLP	BAKAMLA	BNPP	IMIGRASI	DJPAS	DJBC	POS/EKPEDISI	RA	ANGKASAPURA	PEMDA	KEMENTAN	KLHK	KEJAKSAANRI	BRI	BIG	LAPAN	REKAP
25	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
26	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
28	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Tengah	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
31	Sulawesi Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	Sulawesi Selatan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
33	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
34	Maluku	1	1	0	0	0	0	0	2	5	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
35	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	SATUAN KERJA	TNI	P O L R I	K K P	K P L P	BA KA ML A	BNPP	IMIGR ASI	DJP AS	DJ BC	POS/EKP EDISI	RA	ANGKA SA PURA	PE MD A	KEME NTAN	K L H K	KEJAK SAAN RI	B RI N	BIG	LAP AN	REKAP
	Total	14	2 3	2	1	2	1	3	8	74	12	21	10	9	6	2	6	1	2	2	199

Pada table berikut kita sajikan capaian kegiatan pada Direktorat di Deputi Bidang Pemberantasan tahun anggaran 2021



Berdasarkan capaian IKK dalam pemetaan jaringan sindikat narkotika, BNN telah melakukan pemetaan jaringan sindikat narkotika dengan target 47 peta jaringan, BNN berhasil memetakan sebanyak 88 peta jaringan terungkap dengan komposisi pusat sebanyak 27 peta jaringan dan BNNP sebanyak 61 Peta jaringan.

Capaian IKK dalam pengungkapan jaringan sindikat Narkotika target 563 Berkas Perkara (BP) dengan realisasi 1077 Berkas Perkara dengan prosentase 191 %, P2 memiliki target 25 BP dengan realisasi 26 BP dengan prosentase 104 %, Interdiksi 60 BP dengan realisasi 64 BP dengan prosentase 106.6 %, Daftar pencarian orang (DPO) dan Target Operasi (TO) mengalami peningkatan dalam jumlah sehingga target tetap tercapai 100 %, hal ini karena satuan targetnya adalah prosentase. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan menjadi 99.5.

Apa yang dipaparkan pada bagian sebelumnya merupakan bentuk keberhasilan tugas dari seluruh personil Deputi bidang Pemberantasan BNN, oleh karena itu besar harapan kami semua pada tahun berikutnya kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus dikembangkan secara terukur, terarah, dan terencana demi tercapainya cita-cita mulia Indonesia Bebas Narkoba.

III.3 CAPAIAN KENERJA MASING-MASING DIREKTORAT

01

KEGIATAN

Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi

SASARAN

meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil Dipetakan

TARGET

47 Peta jaringan (20 BNN Pusat dan 27 BNNP)

OUTPUT

Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

CAPAIAN OUTPUT

185 Laporan Informasi Intelijen

DIREKTORAT INTELIJEN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT INTELIJEN DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2021

Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

185 Laporan Informasi Intelijen (84 BNN Pusat dan 101 BNNP) 96.85%

1 Layanan Perkantoran 100%

BNNP

TARGET 23 PETA JARINGAN
TERCAPAI 61 PETA JARINGAN
265.21 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp. 48.640.508.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.453.325.700,-

99,62 %

serta dukungan manajemen Rp 6.040.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.781.726.697,-

95,72 %

Direktorat Intelijen mengampu kegiatan pemetaan jaringan sindikat narkoba termasuk didalamnya jaringan sindikat narkoba yang diungkap. Sehingga dalam pelaporan LKIP ini, Direktorat Intelijen menyampaikan dua capaian. Pertama, capaian Direktorat Intelijen jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan. Kedua, capaian Deputi Pemberantasan indikator kinerja program pemberantasan berupa jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap.

A. Capaian Kinerja Direktorat Intelijen Tahun Anggaran 2021.

1. Capaian Kinerja Direktorat Intelijen Tahun 2021

Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional menjalankan kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2021. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. Intelijen Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. Intelijen Tahun 2021

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output	Indikator output kegiatan	Volume output
Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	47 peta jaringan (20 BNN Pusat dan 27 BNNP)	Laporan Informasi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	Laporan Informasi	185 Laporan informasi (84 BNN Pusat dan 101 BNNP)

a. Target dan Capaian Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Intelijen Tahun 2021.

Tabel 4. Target Program Kegiatan Direktorat Intelijen Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program		Target			
				2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotikadan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.	Jumlah jaringan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.	Total	55 Jaringan	65 Jaringan	69 Jaringan	47 Jaringan
			BNN Pusat	23 Jaringan	23 Jaringan	23 Jaringan	20 Jaringan
			BNNP	32 Jaringan	42 Jaringan	46 Jaringan	27 Jaringan

Dari tabel target di atas, diketahui bahwa dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Direktorat Intelijen memiliki indikator kinerja berupa jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan. Dalam empat tahun terakhir target di tahun 2018 sebanyak 55 jaringan yang dipetakan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65 target jaringan, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 69 jaringan yang dipetakan. Sedangkan pada tahun ini target turun menjadi 47 target jaringan sindikat narkotika yang dipetakan.

Selama tahun 2021 telah terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah target yang sudah direncanakan disamping adanya penghematan anggaran. Target IKK semula dari 47 menjadi 43. Perubahan target terjadi di BNNP dimana target berkurang sebanyak 4 (empat) jaringan sehingga total target BNNP menjadi 23 Jaringan. Sedangkan target Direktorat Intelijen di BNN

Pusat tetap 20 jaringan sindikat narkoba yang dipetakan.. Adapun rincian sebagaimana table berikut:

Tabel 4. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Setelah Revisi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2021	
				TARGET AWAL	SETELAH REVISI
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.	Total	47 Jaringan	43 Jaringan
			BNN Pusat	20 Jaringan	20 Jaringan
			BNNP	27 Jaringan	23 Jaringan

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program Kegiatan Direktur Intelijen Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Program Kegiatan Direktur Intelijen Tahun 2021 Setelah adanya Revisi Anggaran.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2021		
				TARGET	CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.	Total	43 Jaringan	88 Jaringan	204,65%
			BNN Pusat	20 Jaringan	27 Jaringan	
			BNNP	27 Jaringan	61 Jaringan	

Capaian Program Kegiatan Direktorat Intelijen Tahun 2021 dari 43 Jaringan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berhasil dipetakan dengan perincian target 20 jaringan oleh BNN Pusat dan target 23 jaringan oleh BNNP. Capaian yang

dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen sebanyak 88 jaringan yang berhasil dipetakan, dengan perincian 27 jaringan yang dipetakan oleh BNN Pusat dalam hal ini dilakukan Direktorat Intelijen dan 61 jaringan yang dipetakan oleh BNNP. Dengan 88 jaringan sindikat narkoba yang dipetakan jika dipersentasekan total capaian dibagi target dikali 100% senilai 204,65%.

Pada tahun 2021, capaian BNN Pusat melebihi target sebanyak 7 jaringan sindikat narkoba yang berhasil dipetakan. Persentase capaian yaitu total capaian yaitu 27 jaringan sindikat narkoba yang berhasil dipetakan dibagi target IKK sebesar 20 jaringan dikali 100% maka persentase capaian adalah 135%.

Adapun rincian capaian jaringan sindikat narkoba yang telah dipetakan oleh BNNP serta dilaporkan ke Direktorat Intelijen sebagai berikut

Tabel.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BNNP (Monevgar) Tahun 2021.

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		
		TARGET IKK	CAPAIAN	%
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	-	-
2	BNNP SUMATERA UTARA	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
3	BNNP SUMATERA BARAT	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
4	BNNP RIAU	1 Peta Jaringan	0 Peta Jaringan	0%
5	BNNP JAMBI	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
6	BNNP SUMATERA SELATAN	1 Peta Jaringan	5 Peta Jaringan	500%
7	BNNP LAMPUNG	1 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	300%
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1 Peta Jaringan	4 Peta Jaringan	400 %
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	2 Peta Jaringan	0 Peta Jaringan	0%

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		
		TARGET IKK	CAPAIAN	%
10	BNNP BENGKULU	0 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200%
11	BNNP DKI JAKARTA	2 Peta Jaringan	6 Peta Jaringan	300%
12	BNNP BANTEN	2 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	100%
13	BNNP JAWA BARAT	2 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	150%
14	BNNP JAWA TENGAH	1 Peta Jaringan	4 Peta Jaringan	400%
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200%
16	BNNP JAWA TIMUR	2 Peta Jaringan	6 Peta Jaringan	300%
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	2 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	100%
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	0 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	300%
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	0 Peta Jaringan	4 Peta Jaringan	400%
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	1 Peta Jaringan	3 Peta Jaringan	300%
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	-	-	-
22	BNNP SULAWESI UTARA	0 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
23	BNNP SULAWESI TENGAH	-	-	-
24	BNNP SULAWESI SELATAN	0 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	-	-	-
26	BNNP SULAWESI BARAT	-	-	-

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		
		TARGET IKK	CAPAIAN	%
27	BNNP MALUKU	-	-	-
28	BNNP MALUKU UTARA	0 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200%
29	BNNP BALI	1 Peta Jaringan	4 Peta Jaringan	400%
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	0 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-
32	BNNP GORONTALO	-	-	-
33	BNNP PAPUA	-	-	-
34	BNNP PAPUA BARAT	-	-	-
TOTAL		23 Peta Jaringan	61 Peta Jaringan	265.21%

Pada tabel di atas, diketahui bahwa terjadi perubahan target capaian IKK BNNP. Semula target IKK sebanyak 27 jaringan menjadi 23 jaringan. Penurunan jumlah target terkait dengan adanya revisi anggaran oleh BNNP dalam rangka *refocusing*, sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah target IKK oleh BNNP.

Adapun persentase hasil capaian Indikator Kinerja BNNP secara keseluruhan mencapai 265,21%. Persentase tersebut didapatkan dari jumlah capaian sebanyak 61 jaringan sindikat narkoba tindak pidana narkoba yang dipetakan dibagi target IKK setelah revisi sebesar 23 jaringan sindikat narkoba yang dipetakan dikali 100%. Capaian yang signifikan melampaui target yang ditetapkan. Data capaian didasarkan pada jumlah produk pemetaan jaringan yang telah dikirimkan oleh BNNP ke BNN Pusat. Namun disamping tingginya capaian BNNP terdapat satu BNNP yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu BNNP Riau. Sesuai dengan target yang ditetapkan jumlah IKK BNNP Riau sebanyak 1 (satu) Jaringan. Pada pelaporan produk peta jaringan yang dikirimkan dan dilaporkan pada BNN Pusat bahwa BNNP dimaksud tidak mengirimkan output capaian peta jaringan. Dari 1 target peta jaringan, output capaian yang dikirimkan 0 dokumen dengan

persentase 0%. Sedangkan terkait dengan pelaporan penggunaan anggaran terlaporkan pada Monevgar.

Capaian hasil kinerja dalam jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipetakan oleh BNN dan BNNP karena faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Untuk capaian BNN Pusat (Direktorat Intelijen) telah terjadi koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pemetaan jaringan sindikat narkoba oleh tim yang berada di lapangan subdit Taktis dan Operasional dengan data yang disuplai dari subdit IT. Sehingga pemetaan yang dilakukan menjadi lebih optimal dan mampu mencapai target dari 20 jaringan menjadi 27 jaringan.
- 2) Untuk capaian BNNP terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 265,21%. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor makin giatnya BNNP dalam melakukan pemetaan jaringan. Sehingga banyak jaringan yang muncul dan berhasil dipetakan. Bahkan terdapat beberapa BNNP yang tidak dibebankan Peta Jaringan, namun dapat mencapai target peta jaringan tersebut. Terdapat 7 (tujuh) BNNP yang tidak dibebankan Peta Jaringan, namun melaporkan capaian dan dokumen Peta Jaringan antara lain BNNP Bengkulu, BNNP Kalimantan Tengah, BNNP Kalimantan Selatan, BNNP Sulawesi Utara, BNNP Sulawesi Selatan, BNNP Maluku Utara, dan BNNP Nusa Tenggara Barat.

b. Capaian Output Direktorat Intelijen Tahun 2021.

Dari Sasaran Kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kegiatan Direktorat Intelijen yaitu Pemetaan Intelijen Berbasis IT memiliki 2 (dua) Output yaitu :

1. Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika.
2. Kajian Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri.
3. Layanan Perkantoran.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Output Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021.

NO.	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT		TARGET TAHUN 2021	
				AWAL	SETELAH REVISI
1.	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	Total	197 Laporan Informasi	191 Laporan Informasi
			BNN Pusat	75 Laporan Informasi	75 Laporan Informasi
			BNNP	122 Laporan Informasi	116 Laporan Informasi
2.	Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	Rekomendasi Kebijakan		1	1
3.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran		1	1

Capaian Indikator Kinerja Output Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021 terdiri dari tiga komponen yaitu komponen 1) Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika, 2) Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri, dan 3) Layanan Perkantoran.

Pada capaian output Laporan Informasi Intelijen, ditetapkan target output sebesar 197 Laporan Informasi. Target output BNN Pusat sebanyak 75 Laporan Informasi dan target capaian output BNNP sebanyak 122 Laporan Informasi.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perubahan jumlah target capaian output Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Total target awal sebanyak 197 jaringan sindikat narkotika yang berhasil dipetakan menjadi 191 Jaringan. Perubahan target terjadi di BNNP. Dimana terdapat revisi sebaran anggaran intelijen dalam rangka refocusing (penghematan anggaran). Sedangkan output Peta Dasar dan Layanan Perkantoran tidak mengalami perubahan

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Output Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021.

NO.	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TAHUN 2021			
			TARGET	CAPAIAN	%	
1.	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	Total	191 Laporan Informasi	185 Laporan Informasi	96,85%
			BNN Pusat	75 Laporan Informasi	84 Laporan Informasi	
			BNNP	116 Laporan Informasi	101 Laporan Informasi	
2.	Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	
3.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1	1	100%	

Pada capaian output Laporan Informasi Intelijen, setelah dilakukan revisi maka target menjadi 191 Laporan Informasi yang terdiri dari 75 laporan informasi merupakan target BNN Pusat dan total 116 laporan informasi menjadi target BNNP. Adapun hasil capaian output Laporan Informasi Intelijen sebanyak 185 laporan dengan persentase 96,85%. Sedangkan output kedua yaitu Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri dengan indikator Rekomendasi kebijakan tercapai sesuai target yaitu 1 rekomendasi dengan persentase 100%. Output ketiga berupa layanan perkantoran dengan indikator layanan perkantoran tercapai sesuai target yaitu 1 kegiatan dengan nilai persentase capaian 100%.

Adapun rincian Capaian output Laporan Informasi Intelijen diselenggarakan oleh BNN Pusat dan BNNP adalah. Realisasi BNN Pusat sebanyak 84 Laporan Informasi dari 75 target dengan nilai persentase mencapai 112%. Sedangkan realisasi capaian output BNNP sebanyak 101 dari 116 target, dengan nilai persentase 87,06%. Indikator penghitungan capaian output BNNP didasarkan pada dokumen Laporan Informasi Intelijen yang dilaporkan dan dikirimkan pada Direktorat Intelijen BNN Pusat.

Adapun rincian capaian indikator Output Sebaran Anggaran Bidang Intelijen Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Output dari Sebaran Anggaran Bidang Intelijen Tahun Anggaran 2021.

NO.	UNIT VERTIKAL	TARGET		CAPAIAN	
		KOMPONEN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
1.	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	053 Pengumpulan Informasi Intelijen	2 Laporan		0%
2.	BNNP SUMATERA UTARA		5 Laporan	4 Laporan	80%

NO.	UNIT VERTIKAL	TARGET		CAPAIAN	
		KOMPONEN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
3.	BNNP SUMATERA BARAT		4 Laporan	1 Laporan	25%
4.	BNNP RIAU		4 Laporan		0%
5.	BNNP JAMBI		4 Laporan	1 Laporan	25%
6.	BNNP SUMATERA SELATAN		4 Laporan	5 Laporan	125%
7.	BNNP LAMPUNG		4 Laporan	4 Laporan	100%
8.	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		4 Laporan	4 Laporan	100%
9.	BNNP KEPULAUAN RIAU		6 Laporan	5 Laporan	83,33%
10.	BNNP BENGKULU		2 Laporan	2 Laporan	100%
11.	BNNP DKI JAKARTA		6 Laporan	8 Laporan	133,33%
12.	BNNP BANTEN		6 Laporan	6 Laporan	100%
13.	BNNP JAWA BARAT		6 Laporan	3 Laporan	50%
14.	BNNP JAWA TENGAH		4 Laporan	4 Laporan	100%
15.	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		4 Laporan	4 Laporan	100%
16.	BNNP JAWA TIMUR		6 Laporan	6 Laporan	100%
17.	BNNP KALIMANTAN BARAT		6 Laporan	6 Laporan	100%
18.	BNNP KALIMANTAN TENGAH		3 Laporan	3 Laporan	100%
19.	BNNP KALIMANTAN SELATAN		2 Laporan	3 Laporan	150%
20.	BNNP KALIMANTAN TIMUR		4 Laporan	4 Laporan	100%

NO.	UNIT VERTIKAL	TARGET		CAPAIAN	
		KOMPONEN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
21.	BNNP KALIMANTAN UTARA		2 Laporan	2 Laporan	100%
22.	BNNP SULAWESI UTARA		2 Laporan	1 Laporan	50%
23.	BNNP SULAWESI TENGAH		2 Laporan	3 Laporan	150%
24.	BNNP SULAWESI SELATAN		2 Laporan	1 Laporan	50%
25.	BNNP SULAWESI TENGGARA		2 Laporan	2 Laporan	100%
26.	BNNP SULAWESI BARAT		2 Laporan	2 Laporan	100%
27.	BNNP MALUKU		2 Laporan	2 Laporan	100%
28.	BNNP MALUKU UTARA		2 Laporan	3 Laporan	150%
29.	BNNP BALI		4 Laporan	4 Laporan	100%
30.	BNNP NUSA TENGGARA BARAT		2 Laporan	4 Laporan	200%
31.	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR		2 Laporan	1 Laporan	50%
32.	BNNP GORONTALO		2 Laporan		0%
33.	BNNP PAPUA		2 Laporan	1 Laporan	50%
34.	BNNP PAPUA BARAT		2 Laporan	2 Laporan	100%
	TOTAL		116 Laporan	101 Laporan	87,06%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target capaian output sebesar 116. Capaian output mengalami perubahan dari 122 yang ditargetkan di awal. Perubahan terjadi karena adanya revisi anggaran dalam rangka *refocusing* penghematan sehingga mempengaruhi kuantitas capaian output.

Adapun total capaian output seluruh BNNP adalah 116 laporan informasi dengan realisasi 101 jaringan sindikat narkoba yang berhasil dipetakan. Adapun persentase capaian adalah 87,06%.

Capaian keseluruhan BNNP dinilai baik yakni di 87,06% yang menunjukkan bahwa kinerja BNNP sudah cukup maksimal kendati dalam kondisi Covid-19. Akan tetapi jika diklasifikasi, capaian BNNP dapat *dirating* menjadi a) capaian melebihi 100%, b) capaian 100%, c) capaian antara 50% s.d. 99%, d) capaian 1% s.d. 49% dan e) capaian 0%.

BNNP dengan capaian sangat baik dengan target melebihi 100% dicapai oleh 6 (enam) BNNP yaitu BNNP Sumatera Selatan, BNNP DKI Jakarta, BNNP Kalimantan Selatan, BNNP Sulawesi Tengah, BNNP Maluku Utara, BNNP Nusa Tenggara Barat. Sedangkan BNNP dengan capaian 100% sebanyak 16 (enam belas) BNNP antara lain: BNNP Lampung, BNNP Kepulauan Bangka Belitung, BNNP Bengkulu, BNNP Banten, BNNP Jawa Tengah, BNNP DI Yogyakarta, BNNP Jawa Timur, BNNP Kalimantan Barat, BNNP Kalimantan Tengah, BNNP Sulawesi Tenggara, BNNP Sulawesi Barat, BNNP Maluku, BNNP Bali, dan BNNP Papua Barat. BNNP dengan capaian antara 80% s.d. 85% antara lain BNNP Sumatera Utara dan BNNP Kepulauan Riau.

Di antara capaian BNNP yang cukup baik terdapat BNNP yang capaian masih belum maksimal. Terdapat 6 (enam) BNNP dengan persentase capaian BNNP berkisar antara 25% hingga 50%. BNNP tersebut antara lain BNNP Sumatera Barat, BNNP Jawa Barat, BNNP Sulawesi Utara, BNNP Sulawesi Selatan, BNNP Nusa Tenggara Timur, dan BNNP Papua. Dan terdapat 3 (tiga) BNNP dengan capaian terendah yaitu 0%. BNNP tersebut antara lain BNNP Aceh, BNNP Riau, dan BNNP Gorontalo. BNNP tidak mengirimkan berkas dokumen Laporan Informasi ke BNN Pusat.

Distribusi Anggaran

Output dan Anggaran Direktorat Intelijen Tahun 2021.

KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TAHUN 2021		
			PAGU	REALISASI	%
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	46.891.308.000	46.730.906.700	99,66 %
	Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	Rekomendasi Kebijakan	1.749.200.000	1.722.419.000	98,47 %
	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	6.040.020.000	5.781.726.967	95,72 %
Capaian Realisasi			54.680.528.000	54.235.052.667	99,19 %

Pada Tahun Anggaran 2021, Direktorat Intelijen memiliki 3 (tiga). Output pertama, berupa Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Pagu Rp. 46.891.308.000,- terealisasi sebanyak Rp. 46.730.906.700,- dengan nilai persentase 99,66%. Adapun output kedua, berupa Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri dengan pagu Rp. 1.749.200.000,- terealisasi sebanyak Rp. 1.722.419.000,- dengan nilai persentase 98,47%. Sedangkan output ketiga berupa Layanan Perkantoran dengan pagu Rp. 6.040.020.000,- terealisasi sebanyak Rp. 5.781.726.967,- dengan nilai

persentase 95,72%. Sedangkan total Pagu anggaran Rp. 54.680.528.000,- terealisasi sebanyak Rp. 54.235.052.667,- dengan nilai persentase 99,19%.

Adapun Direktorat Intelijen sebagai pembina fungsi Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi mendistribusikan anggaran ke 34 BNNP sebanyak Rp. 6.100.000.000,- kemudian dilakukan revisi optimalisasi sehingga menjadi Rp. 5.672.102.000,-.

Sebaran Anggaran Setelah Revisi Bidang Intelijen Tahun 2021.

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		ANGGARAN	
		TARGET IKK	VOLUME OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	2 Laporan	053 Pengumpulan Informasi Intelijen	100.000.000
2	BNNP SUMATERA UTARA	1 Peta Jaringan	5 Laporan		250.000.000
3	BNNP SUMATERA BARAT	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
4	BNNP RIAU	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
5	BNNP JAMBI	1 Peta Jaringan	4 Laporan		150.000.000
6	BNNP SUMATERA SELATAN	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
7	BNNP LAMPUNG	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1 Peta Jaringan	4 Laporan		140.000.000
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	2 Peta Jaringan	6 Laporan		300.000.000
10	BNNP BENGKULU	-	2 Laporan		100.000.000
11	BNNP DKI JAKARTA	2 Peta Jaringan	6 Laporan		249.042.000
12	BNNP BANTEN	2 Peta Jaringan	6 Laporan		300.000.000
13	BNNP JAWA BARAT	2 Peta Jaringan	6 Laporan		300.000.000
14	BNNP JAWA TENGAH	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		ANGGARAN	
		TARGET IKK	VOLUME OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
16	BNNP JAWA TIMUR	2 Peta Jaringan	6 Laporan		363.060.000
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	2 Peta Jaringan	6 Laporan		3000.000.000
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	-	3 Laporan		150.000.000
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	-	2 Laporan		100.000.000
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	-	2 Laporan		100.000.000
22	BNNP SULAWESI UTARA	-	2 Laporan		100.000.000
23	BNNP SULAWESI TENGAH	-	2 Laporan		100.000.000
24	BNNP SULAWESI SELATAN	-	2 Laporan		100.000.000
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	-	2 Laporan		100.000.000
26	BNNP SULAWESI BARAT	-	2 Laporan		100.000.000
27	BNNP MALUKU	-	2 Laporan		100.000.000
28	BNNP MALUKU UTARA	-	2 Laporan		100.000.000
29	BNNP BALI	1 Peta Jaringan	4 Laporan		200.000.000
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	-	2 Laporan		100.000.000
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	-	2 Laporan		100.000.000
32	BNNP GORONTALO	-	2 Laporan		70.000.000
33	BNNP PAPUA	-	2 Laporan		100.000.000

NO	UNIT VERTIKAL	KINERJA		ANGGARAN	
		TARGET IKK	VOLUME OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
34	BNNP PAPUA BARAT	-	2 Laporan		100.000.000
	TOTAL	23 Peta Jaringan	116 Laporan		5.672.102.000

Selama tahun 2021, target IKK dan target capaian output BNNP mengalami perubahan. Perubahan disebabkan adanya revisi anggaran dalam rangka penghematan (refocusing) ataupun adanya dana hibah sehingga anggaran dan target berubah dari yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Target IKK BNNP semula adalah 27 jaringan berubah menjadi 23 jaringan. Sedangkan target capaian output semula 122 Laporan Informasi menjadi 116 Laporan Informasi.

Distribusi Anggaran BNNP

Realisasi output BNNP Tahun 2021.

NO	UNIT VERTIKAL	ANGGARAN		
		ALOKASI	REALISASI	%
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100.000.000	97.174.975	97,17%
2	BNNP SUMATERA UTARA	250.000.000	249.999.586	100%
3	BNNP SUMATERA BARAT	200.000.000	198.652.438	99,33%
4	BNNP RIAU	200.000.000	195.184.548	97,59%
5	BNNP JAMBI	150.000.000	147.919.795	98,61%
6	BNNP SUMATERA SELATAN	200.000.000	199.512.368	99,76%
7	BNNP LAMPUNG	200.000.000	199.999.469	100%
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	140.000.000	140.000.000	100%
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	300.000.000	299.105.026	99,70%

NO	UNIT VERTIKAL	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
10	BNNP BENGKULU	100.000.000	99.255.500	99,26%
11	BNNP DKI JAKARTA	249.042.000	248.840.000	99,92%
12	BNNP BANTEN	300.000.000	299.934.000	99,98%
13	BNNP JAWA BARAT	300.000.000	300.000.000	100%
14	BNNP JAWA TENGAH	200.000.000	199.999.998	100%
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	200.000.000	199.831.475	99,92%
16	BNNP JAWA TIMUR	363.060.000	359.359.292	98,98%
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	300.000.000	299.032.000	99,68%
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	150.000.000	149.905.635	99,94%
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	100.000.000	99.687.701	99,69%
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	200.000.000	183.692.880	91,85%
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	100.000.000	100.000.000	100%
22	BNNP SULAWESI UTARA	100.000.000	99.989.865	99,99%
23	BNNP SULAWESI TENGAH	100.000.000	99.999.700	100%
24	BNNP SULAWESI SELATAN	100.000.000	100.000.000	100%
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	100.000.000	99.998.955	100%
26	BNNP SULAWESI BARAT	100.000.000	99.780.000	99,78%
27	BNNP MALUKU	100.000.000	99.776.000	99,78%
28	BNNP MALUKU UTARA	100.000.000	100.000.000	100%
29	BNNP BALI	200.000.000	199.997.543	100%
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	100.000.000	99.785.786	99,79%

NO	UNIT VERTIKAL	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	100.000.000	98.580.000	98,58%
32	BNNP GORONTALO	70.000.000	69.993.000	99,99%
33	BNNP PAPUA	100.000.000	99.880.000	99,88%
34	BNNP PAPUA BARAT	100.000.000	100.000.000	100%
	TOTAL	5.672.102.000	5.435.987.535	95,84%

Realisasi anggaran yang dilaporkan pada aplikasi Monevgar oleh BNNP dengan total alokasi Rp.5.672.102.000,- dari semula Rp. 6.100.000.000,-. Alokasi mengalami pengurangan selama tahun 2021 dikarekan adanya *refocusing* anggaran. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5.435.987. 535,-. Dilihatdari realisasi anggaran output BNNP Bidang Intelijen komponen pengumpulan informasi intelijen terdapat 12 BNNP yang persentase realisasi anggarannya terlaporkan mencapai 100% yaitu BNNP Sumatera Utara, BNNP Lampung, BNNP Bangka Belitung, BNNP Jawa Barat, BNNP Jawa Tengah, BNNP Kalimantan Utara, BNNP Sulawesi Tengah, BNNP Sulawesi Selatan, BNNP Sulawesi Tenggara, BNNP Maluku Utara, BNNP Bali, dan BNNP Papua Barat. Sedangkan realisasi 22 BNNP terlaporkan di atas 90% (>90%). Secara keseluruhan, realisasi komponen pengumpulan informasi intelijen dapat terserap sebanyak 95,84%.

Sesuai dengan pelaporan output BNNP kepada BNN Pusat terdapat 3 (tiga) BNNP yang tidak melaporkan dan mengirimkan capaian output berupa pengiriman dokumen Laporan Informasi Intelijen ke BNN Pusat. Ketiga BNNP tersebut antara lain: BNNP Aceh, BNNP Riau, dan BNNP Gorontalo.

Adapun Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Informasi jaringan sindikat narkoba yang dilaksanakan BNNP dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN T.A. 2021 sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi tentang peredaran narkoba dan adanya kepercayaan masyarakat pada BNNP dalam ungkap jaringan cukup besar sehingga membuat kinerja BNNP semakin baik.

- b. Terjalannya kerja sama dan koordinasi antar penegak hukum dari Polri, Lapas, dan BNNP serta instansi terkait lainnya dalam pemberantasan narkotika di wilayah.

Kesadaran, kemauan, kerja keras dan konsisten dalam pengungkapan jaringan dari berbagai pihak sehingga membuat kinerja BNNP lebih optimal dari sebelumnya terutama adanya dukungan anggaran yang diberikan ke Wilayah.

Faktor kendala yang sering dihadapi BNNP umumnya dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan Informasi jaringan sindikat narkotika yang dilaksanakan BNNP dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN T.A. 2021 sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah personel bidang intelijen khususnya dan bidang pemberantasan pada umumnya sehingga pemetaan yang harus dilakukan secara IT dan penyelidikan di lapangan akan tumpang tindih dengan penyidikan sehingga umumnya BNNP tidak dapat optimal melakukan beberapa kegiatan penyidikan dan penyelidikan dengan jumlah personel yang terbatas.
- b. Terdapat kekosongan pejabat struktural pada seksi intelijen di BNNP khususnya. Kekosongan bahkan sudah berlangsung 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Sehingga hal ini cukup mengganggu performa pencapaian kinerja dalam pemetaan jaringan sindikat narkotika di BNNP.
- c. Terdapat perbedaan persepsi antara pimpinan dengan personel di kewilayahan terkait penggunaan anggaran bidang intelijen. Tujuan penggunaan anggaran adalah kegiatan pemetaan jaringan sindikat narkotika berbasis IT, sedangkan kegiatan penyelidikan berbasis *human* dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran dari mata anggaran penyelidikan. Faktor ini juga sangat mempengaruhi kinerja BNNP.
- d. Pemahaman dalam tugas pengumpulan informasi jaringan sindikat TP Narkotika masih kurang. Secara kuantitas hasil capaian output masih belum sesuai dengan target.
- e. Terbatasnya dukungan Bantuan Teknologi Intelijen serta letak geografis yang sulit mempengaruhi jalur masuk/penyelundupan narkotika ke Indonesia.

Kegiatan pemetaan dan penyelidikan masih terpusat kepada beberapa wilayah sepanjang perairan Sumatera dan Kalimantan.

Adapun rekomendasi tindak lanjut atas kendala yang dihadapi BNNP sebagai berikut :

- a. Melaporkan keterbatasan anggota personel bidang intelijen kepada pihak Biro Kepegawaian karena menjadi kendala utama yang dihadapi keseluruhan BNNP. Namun untuk sementara dengan tetap mengoptimalkan kemampuan personel yang ada melalui koordinasi yang intensif dengan pusat dan membangun *sharing* informasi dengan jajaran bidang intelijen di wilayah lain dalam komunitas Intelijen BNN agar pemahaman para anggota personel bidang intelijen dapat terbuka dan wawasan menjadi bertambah.
- b. Melaporkan kekosongan pejabat struktural (Kasi Intelijen dan atau Kabid Pemberantasan pada BNNP) kepada Biro SDM dan Aparatur Settama BNN. Hal ini, agar segera ditindaklanjuti Biro SDMA untuk mengisi kekosongan pejabat pada BNNP karena kekosongan pejabat sangat mempengaruhi performa kinerja khususnya bidang intelijen.
- c. Meningkatkan pemahaman bidang intelijen kepada anggota personel intelijen di BNNP dengan melakukan Bimbingan Teknis Intelijen dalam upaya meningkatkan kemampuan personel dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.
- d. Menambah dukungan peralatan IT yang mendukung terlaksanannya kegiatan pemetaan jaringan sindikat narkoba di BNNP sehingga hasilnya akan lebih cepat, akurat dan optimal.

Berdasarkan realisasi anggaran Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi Pusat dan 34 BNNP bahwa :

- a. Realisasi Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi pada BNN Pusat dengan total Pagu anggaran Rp. 48.640.508.000,- terealisasi sebanyak Rp. 48.453.325.700,- dengan nilai persentase 99,62%.
- b. Realisasi Anggaran BNNP sebesar Rp. 5.672.102.000,- terealisasi sebesar

Rp. 5.435.987.535,- atau persentase total sebesar 95,84%. Pada tahun ini, BNNP cukup aktif melaporkan realisasi anggaran pada Monevgar dengan capaian semua BNNP di atas 90%. 12 (dua belas) BNNP dengan capaian realisasi 100%, sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) BNNP dengan capaian di atas 90%. Terkait pelaporan dokumen capaian output yang dikirimkan oleh BNNP kepada Direktorat Intelijen, terdapat 3 (tiga) BNNP yang tidak mengirimkan antara lain BNNP Aceh, BNNP Riau, dan BNNP Gorontalo.

- c. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.453.325.700,- di BNN Pusat (99,62%) dan realisasi Rp. 5.435.987.535,- (95,84%) di BNNP. Total realisasi Rp. 53.889.313.235,- dengan nilai persentase 99,22%. Capaian realisasi Anggaran Pusat dan BNNP dalam pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi masuk dalam kategori baik dengan nilai persentase penyerapan mencapai 99,22%.

dengan total alokasi Rp.5.672.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.435.987. 535,-. Dilihat dari realisasi anggaran output BNNP Bidang Intelijen komponen pengumpulan informasi intelijen terdapat 12 BNNP yang persentase realisasi anggarannya dilaporkan mencapai 100% yaitu BNNP Sumatera Utara, BNNP Lampung, BNNP Bangka Belitung, BNNP Jawa Barat, BNNP Jawa Tengah, BNNP Kalimantan Utara, BNNP Sulawesi Tengah, BNNP Sulawesi Selatan, BNNP Sulawesi Tenggara, BNNP Maluku Utara, BNNP Bali, dan BNNP Papua Barat. Sedangkan realisasi 22 BNNP dilaporkan di atas 90% (>90%). Secara keseluruhan, realisasi komponen pengumpulan informasi intelijen dapat terserap sebanyak 95,84%.

Sesuai dengan pelaporan output BNNP kepada BNN Pusat terdapat 3 (tiga) BNNP yang tidak melaporkan dan mengirimkan capaian output berupa pengiriman dokumen Laporan Informasi Intelijen ke BNN Pusat. Ketiga BNNP tersebut antara lain: BNNP Aceh, BNNP Riau, dan BNNP Gorontalo.

02

KEGIATAN

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP
NARKOTIKA

SASARAN

Meningkatnya pengungkapan tindak
pidana narkotika dan lahan tanaman
ganja dan tanaman terlarang lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana
narkotika yang P-21
2. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan
tanaman terlarang lainnya yang
dimusnahkan

TARGET

563 Berkas P21
13 Lokasi

OUTPUT

1. Berkas perkara tindak pidana
narkotika yang P-21
2. Titik lahan tanaman ganja dan
tanaman terlarang lainnya yang
dimusnahkan

CAPAIAN OUTPUT

1077 Berkas P21
18 Lokasi Ladang Ganja

DIREKTORAT NARKOTIKA

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT
NARKOTIKA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN
2021

1077 BERKAS P21

18 LOKASI LADANG GANJA

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp.
16.081.549.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.
15.083.999.949,-

93,80 %

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2021 Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai 2 Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 3 Indikator Kinerja Utama (*output*). Ketiga indikator kinerja tersebut telah terealisasi dan bahkan capaiannya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika
Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	19 Berkas	30 Berkas	158 %
Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika di BNNP					
1	BNNP Aceh	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	18 Berkas	48 Berkas	267 %
2	BNNP Sumut	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	28 Berkas	73 Berkas	260 %
3	BNNP Sumbar	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	17 Berkas	29 Berkas	170 %
4	BNNP Riau	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	22 Berkas	28 Berkas	127 %
5	BNNP Kepulauan Riau	Jumlah Berkas Perkara Kasus Pidana Tindak Pidana Narkotika P21	23 Berkas	36 Berkas	156 %
6	BNNP Bangka Belitung	Jumlah Berkas Perkara Kasus	10 Berkas	22 Berkas	220%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Tindak Pidana Narkotika P21			
7	BNNP Jambi	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	15 Berkas	69 Berkas	460 %
8	BNNP Bengkulu	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	20 Berkas	27 Berkas	135 %
9	BNNP Sumsel	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	15 Berkas	44 Berkas	293 %
10	BNNP Lampung	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	10 Berkas	17 Berkas	170%
11	BNNP Jawa Barat	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	22 Berkas	47 Berkas	213 %
12	BNNP DKI Jakarta	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	20 Berkas	22 Berkas	110 %
13	BNNP Banten	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	14 Berkas	13 Berkas	93 %
14	BNNP DIY	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	17 Berkas	36 Berkas	212 %
15	BNNP Jawa Tengah	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	19 Berkas	32 Berkas	168 %
16	BNNP Jawa Timur	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	24 Berkas	40 Berkas	167 %
17	BNNP Kaltara	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	15 Berkas	13 Berkas	86 %
18	BNNP Kaltim	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	34 Berkas	43 Berkas	126 %
19	BNNP Kalbar	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	16 Berkas	16 Berkas	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
20	BNNP Kalsel	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	20 Berkas	44 Berkas	220 %
21	BNNP Kalteng	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	10 Berkas	45 Berkas	450 %
22	BNNP Bali	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	24 Berkas	47 Berkas	196 %
23	BNNP NTB	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	10 Berkas	29 Berkas	220 %
24	BNNP NTT	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	5 Berkas	7 Berkas	140 %
25	BNNP Sulut	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	15 Berkas	23 Berkas	153 %
26	BNNP Sultra	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	13 Berkas	15 Berkas	115 %
27	BNNP Sulteng	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	15 Berkas	53 Berkas	353 %
28	BNNP Sulsel	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	25 Berkas	49 Berkas	196 %
29	BNNP Gorontalo	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	10 Berkas	7 Berkas	70 %
30	BNNP Sulbar	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	10 Berkas	29 Berkas	310%
31	BNNP Maluku	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	5 Berkas	14 Berkas	280 %
32	BNNP Maluku Utara	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	8 Berkas	12 Berkas	162%
33	BNNP Papua	Jumlah Berkas Perkara Kasus	10 Berkas	12 Berkas	120 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Tindak Pidana Narkotika P21			
34	BNNP Papua Barat	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	5 Berkas	5 Berkas	100 %
	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 di Pusat dan BNNP		563 Berkas	1076 Berkas	191%
2.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya				
	Pusat/Direktorat Narkotika	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	8 Titik Lokasi	11 Titik	138 %
	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik	100 %
	BNNP Sumatera Utara	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	3 Titik Lokasi	6 Titik	200 %
	BNNP Papua	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	0 Titik Lokasi/direco fusing	- Titik	- %
	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya di Pusat dan Daerah/ BNNP		13 Titik Lokasi	18 Titik	138,46%

B. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui bahwa target yang telah di tetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampau.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun anggaran 2021 seluruh target yang telah ditetapkan realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut disatu sisi dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang yang berani mengambil risiko terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena motivasi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para tersangka.

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya menambah dan melengkapi peralatan IT, menambah atau meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan hukum atau menekan supply narkoba dan prekursor narkoba ilegal yang masuk ke Indonesia dan terutama dengan penambahan tenaga penyidikdi BNN.

Di sisi lain, BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti: ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditenggarai peredaran gelap narkoba).

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba(Pusat / Direktorat Narkoba)	1269	1061	1076
2.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya (Pusat / Direktorat Narkoba)	17	17	18

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2021, Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan memiliki pagu anggaran **45,659,510,000 (Empat puluh lima Milyar enamratus limapuluh Sembilan juta limaratus sepuluh ribu Rupiah).**, Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Kegiatan di Pusat/Direktorat Narkotika dan di Daerah/BNNP serta BNNK

Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN menerima anggaran sebesar **Rp. 16.081.549.000,- (enam belas milyar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)**, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi penggunaan anggaran Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN tahun 2021

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1.	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika(Pusat / Direktorat Narkotika)	3.381.733.000	3.338.538.018	43.194.982	99 %
2.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya (Pusat / Direktorat Narkotika)	4.925.223.000	4.919.496.011	5.726.989	100%
3.	PETA TEMATIK	7.774.593.000	6.796.536.920	978.056.080	87%
Jumlah/% rata-rata		16.081.549.000	15.054.570.949	1.026.978.051	94 %

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 2.2 tersebut diatas, Direktorat Narkotika pada Tahun Anggaran 2021 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar **Rp.1.026.978.051,- (Satu Milyard Dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah)**

Kemudian Pagu Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan Output (5354) berkas perkara tindak pidana narkotika dan titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya di daerah sebesar **Rp. 38.305.587.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

Adapun perincian alokasi anggaran yang diberikan untuk Satker Daerah/ BNNP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi penggunaan anggaran di Daerah/BNNP tahun 2021

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika				
1.	BNNP Aceh (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	1.296.354.000	1.230.509.900	65.844.100	95 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	400.000.000	392.351.750	7.648.250	98 %

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2.	BNNP Sumut (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	1.972.436.000	1.963.577.204	8.858.796	100 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	600.000.000	569.228.000	30.772.000	95 %
3.	BNNP Sumatera Barat	1.182.061.000	1.115.292.333	66.768.667	94 %
4.	BNNP Riau	1.220.100.000	1.203.833.444	16.266.556	99 %
5.	BNNP Kepulauan Riau	2.027.152.000	2.026.878.165	273.835	100%
6.	BNNP Bangka Belitung	671.877.000	668.970.682	2.906.318	100%
7.	BNNP Jambi	1.034.186.000	1.021.155.920	13.030.080	99%
8.	BNNP Bengkulu	1.344.057.000	1.303.712.750	40.344.250	97%
9.	BNNP Sumsel	1.000.072.000	990.646.279	9.425.721	99%
10.	BNNP Lampung	754.888.000	753.700.000	1.188.000	100%
11.	BNNP Jabar	1.576.225.000	1.565.440.000	10.785.000	99%
12.	BNNP DKI	1.104.911.000	1.100.924.000	3.987.000	100%
13.	BNNP Banten	992.346.000	879.592.800	112.753.200	89%

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
14.	BNNP D.I.Yogyakarta	1.229.932.000	1.227.712.200	2.219.800	100%
15.	BNNP Jawa Tengah	1.211.916.000	1.211.226.992	689.008	100%
16.	BNNP Jawa Timur	1.516.484.000	1.473.447.048	43.036.952	97%
17.	BNNP Kaltara	918.435.000	916.724.744	1.710.256	100%
18.	BNNP Kaltim	1.362.456.000	1.280.031.430	82.424.570	94%
19.	BNNP Kalbar	1.131.544.000	1.129.783.800	1.760.200	100%
20.	BNNP Kalsel	1.401.754.000	1.399.612.126	2.141.874	100%
21.	BNNP Kalteng	783.098.000	761.665.466	21.432.534	97%
22.	BNNP Bali	1.360.394.000	1.358.300.283	2.093.717	98%
23.	BNNP NTB	789.000.000	781.589.153	7.410.847	99%
24.	BNNP NTT	436.835.000	431.714.582	5.120.418	99%
25.	BNNP Sulawesi Utara	1.088.928.000	1.060.524.929	28.403.071	97%
26.	BNNP Sultra	1.030.900.000	1.028.326,605	2.573.395	100%
27.	BNNP Sulteng	1.015.823.000	1.014.343.563	1.479.437	100%

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
28	BNNP Sulsel	1.380.153.000	1.360.671.147	19.481.853	99%
29.	BNNP Gorontalo	623.575.000	623.575.000	0	100%
30	BNNP Sulbar	771.153.000	770.636.700	516.300	100%
31	BNNP Maluku	509.523.000	509.478.635	44.365	100%
32	BNNP Maluku Utara	806.020.000	806.020.000	0	100%
33	BNNP Papua	1.129.975.000	1.116.608.697	13.366.303	99%
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	105.596.000	89.618.000	15.978.000	85%
34	Papua Barat	525.438.000	525.434.358	3.642	100%
Jumlah/% rata-rata		38.305.587.000	37.659.942.685	645.644.315	98 %

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 2.3 tersebut diatas, BNNP pada Tahun Anggaran 2021 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. **645.644.315 (Enam ratus empat puluh lima juta enam ratus empatpuluh empat ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah)**

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut di atas antara lain :

1. Setiap Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mendukung kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan sehingga tidak terjadi in-efisiensi penggunaan anggaran.

2. Penugasan personel diatur sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan ditunjuk sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.
3. Pemanfaatan peralatan teknologi intelijen yang dimiliki BNN mampu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga anggaran yang digunakan untuk operasional lebih efisien.
4. Optimalisasi metode analisa data intelijen yang akurat dan efektifitas kerja anggota di lapangan terbukti berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan kejahatan narkoba.

Di tahun 2021 **Rp. 54.387.146.000,- (Limapuluh Empat Milyar Tiga ratus Delapan puluh tujuh Juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah)** dengan Realisasi **Rp. 52.714.513.634,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat belas juta Lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** atau sebesar 97% dengan sisa anggaran yang tidak terserap **Rp. 1.672.632.366 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)**, dengan pencapaian kinerja ini menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan atau penggunaan anggaran pada Direktorat Narkoba Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya inovasi dan terobosan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemberantasan, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan RAB yang akurat, dengan mempertimbangkan dan

memperhatikan kemampuan dan kompetensi anggota yang ditugaskan di lapangan, pemanfaatan peralatan teknologi intelijen secara tepat dan optimalisasi metode analisa data intelijen serta mengefektifkan cara kerja anggota di lapangan.

03

KEGIATAN

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

SASARAN

Meningkatnya pengawasan distribusi
Psikotropika dan Prekursor Narkotika

INDIKATOR

KINERJA KEGIATAN

1. Jumlah Berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21
2. Jumlah Importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkotika non farmasi yang diawasi
3. Jumlah Pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika

TARGET

22 Berkas
30 Perusahaan
14 Laporan

OUTPUT

1. Berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21
2. Importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkotika non farmasi yang diawasi
3. Pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika

CAPAIAN OUTPUT

26 Berkas P21
28 Laporan
11 Laporan

DIREKTORAT PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT
PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR DEPUTI BIDANG
PEMBERANTASAN TAHUN 2021

26 BERKAS P21

28 LAPORAN

11 LAPORAN

1. TARGET 25 BERKAS P-21
TERCAPAI 26 BERKAS P-21
104 %
2. TARGET 28 LAPORAN
IMPORTIR TERCAPAI 28
LAPORAN 100 %
3. TARGET 10 LAPORAN
PENGUNGKAPAN KASUS TP
PSIKOTROPIKA TERCAPAI 11
LAPORAN 110 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp.
6.198.530.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.
6.167.470.000,-
99,50 %

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2021, seiring waktu sejak bulan Maret tahun 2020 di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap seluruh program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan, revisi anggaran pandemi Covid-19 Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan telah dilakukan untuk melanjutkan Sasaran Kegiatan yang telah dijabarkan menjadi 3 (Tiga) Output. Ketiga Output tersebut memiliki 3 IKK (Ketiga Indikator Kinerja) yang direalisasikan dan capaian masing-masing dari target yang telah ditetapkan menyesuaikan revisi anggaran masa pandemic Covid-19, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Sesuai Perjanjian Kinerja)	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	7
1.	Meningkatnya pengawasan distribusi Psikotropika dan Prekursor	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	25	26	Berkas
		Jumlah Importir terdaftar dan Pengguna Akhir Prekursor Narkotika Non Farmasi yang diawasi	28	28	Laporan
		Jumlah Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Psikotropika	10	11	Laporan

Sebagaimana tabel di atas dijelaskan bahwa Capaian Direktorat Psikotropika dan Prekursor dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

- 1). Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 tercapai 26 berkas dengan presentasi 104 %.

- 2). Jumlah Importir terdaftar dan Pengguna akhir Prekursor Narkotika Non Farmasi yang diawasi 28 Importir dengan Presentasi sebesar 100 %.
- 3). Jumlah Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Psikotropika tercapai 11 laporan dengan persentase sebesar 110 % .
- 4). Perbandingan Capaian Direktorat P2 tahun 2019,2020,2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Sesuai Perjanjian Kinerja)	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya pengawasan distribusi Psikotropika dan Prekursor	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	28	35	26
		Jumlah Importir terdaftar dan Pengguna Akhir Prekursor Narkotika Non Farmasi yang diawasi	54	37	28
		Jumlah Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Psikotropika	10	12	11

**Realisasi Penggunaan Anggaran bulan Desember Tahun 2021
Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN**

KEGIATAN	OUTPUT	KOMPONEN	PAGU ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (Rp)	%
3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	001 Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	051 Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi	50.861.000	42.150.450	82,87%
		052 Penyelidikan Kasus Tindak	4.907.971.000	4.881.782.600	99,47%

		Pidana Prekursor Narkotika			
		053 Penyidikan Kasus Tindak pidana precursor narkotika	1.884.782.000	1.882.279.950	99,87%
		054 Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana precursor narkotika	62.280.000	50.950.000	82%
	002 Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika	051 Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor narkotika	1.076.760.000	1.075.939.600	99,92%
	003 Laporan hasil pengawasan Importir dan pengguna akhir prekursor narkotika	051 Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor narkotika	213.799.000	209.747.800	98,11%
Jumlah			6.198.530.000	6.167.470.000	99,50%

Dari tabel tersebut di atas diketahui Penyerapan Anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor terlealisasi sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 6.167.470.000,- (**enam milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah**) dengan Presentasi **99.50 %**

Data perusahaan yang menjadi mitra BNN & data PNB

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PNBP	VOLUME	TARIF (RP)	JUMLAH (RP)
1	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Penunjukan IT Prekursor Narkotika Non Farmasi	1	1.975.500	1.975.500
2.	PT. PKG Lautan Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	1	1.975.500	1.975.500
3.	PT. Sinar Berkah Anugrah	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	1	1.975.500	1.975.500
4.	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	1	1.975.500	1.975.500
5.	PT. Arta Palu	Penerbitan Rekomendasi	1	1.975.500	1.975.500

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PNBP	VOLUME	TARIF (RP)	JUMLAH (RP)
		Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi			
6.	PT. RCT	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi	1	1.975.500	1.975.500
JUMLAH					11.853.000

Dari table tersebut diatas diketahui data PNBP Tahun 2021 sebesar RP. 11.853.000 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan jumlah 6 PT Importir terdaftar.

DAFTAR PERSONELP2 YANG SUDAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN TAHUN 2021

<u>No</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Nama</u>	<u>Perusahaan/PT</u>
1.	11 – 12 Januari 2021	•	PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
2.	21 – 22 April 2021	•	PT. SARI SARANA KIMIATAMA
3.	21 – 22 April 2021	•	PT. SINAR KIMIA UTAMA

No	Tanggal	Nama	Perusahaan/PT
4.	21 – 22 Juni 2021	•	PT. PKG LAUTAN INDONESIA
5.	23 – 24 Juni 2021	•	PT. SAMCHEM PRASANDHA
6.	24 – 25 Juni 2021	•	PT. PRINTECHINDO RAYA UTAMA
7.	6 – 7 Juli 2021	•	PT. HALIM SAKTI PRATAMA
8.	15 – 16 Juli 2021	•	PT. SMART LAB INDONESIA
9.	15 – 16 Juli 2021	•	PT. PURYTEK TUNGGAL PRIMA
10	8 S.d September 2021	•	PT. KARUNIA JASINDO
11	13 S.d 14 Sept 2021	•	PT. JATIKA NUSA
12	13 s.d 14 Sept 2021	•	PT. ITOCHU INDONESIA
13	13 s.d 14 Sept 2021	•	PT. UDAYA ANUGRAH
14	13 s.d 14 Sept 2021	•	PT. ESSENCE
15	20 S.d 21 Sept 2021	•	PT. TIRTA SURYA

No	Tanggal	Nama	Perusahaan/PT
16	10-11 Juni 2021	•	SINAR BERKAT ANUGRAH
17	14-15 Juni 2021	•	ELANG KURNIA SAKTI
18	20 S.d 21 Sept 2021	•	PT. TIMUR RAYA
19	11 S.d 12 Oktober 2021	•	PT. RUKUN PERSADA MAKMUR
20	21 s.d 22 Oktober 2021	•	PT. KEMINDO

DAFTAR PROVNSI YANG SUDAH DI LAKUKAN PENGAWASAN TAHUN 2021

No.	Tanggal	Nama	Provinsi
1.	17 – 20 Maret 2021	•	JAWA TIMUR
2.	6 – 9 April 2021	•	JAWA BARAT
3.	15 – 18 Juni 2021	•	SUMATERA SELATAN
4.	29 Juni – 2 juli 2021	•	KEPULAUAN RIAU
5.	29 Juni – 2 juli 2021	•	SUMATERA BARAT
6.	29 Juni – 2 juli 2021	•	BANTEN

7.	23 S.d 26 Agustus 2021	•	JAWA BARAT
8.	23 S.d 26 Agustus 2021	•	BANTEN
9.	November 2021	•	JAWA BARAT
10.	November 2021	•	BALI

Data Penanganan Perkara Clandestine Lab (CL) 2020 & 2021

NO	NO LKN	TGL LKN	TKP	JUMLAH TSK	NAMA TSK	JENIS KASUS	BB	JUMLAH	PENYIDIK	STATUS (SELESAI)
1	LKN/15-P2/III/2020/BNN	3/10/2020	Perumahan Taman Permata Indah & Teluk Gong Timur, Penjaringan, Jakarta Utara.	2	ZEFRY @ ASUN dan Nicky Bin Kho Tian Ho	CLANDESTINE LAB	SULPHURIC ACID, Ephedrine Cair, Toluene, Ephedrine Serbuk	26000.00 (MILI LITER), 300,00 (Mili Liter), 20,00 (Mili Liter), 409,40 (Gram)	IRWAN AFFANDI	
2	LKN/48/P2/X/2021/BNN	19-10-2021	Jl. Cemara Abadi, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan Prov. Sumut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah pelaku di Jl. Pancing Lingk VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Prov. Sumatera Utara.	3	SUTRISNO LASE @ SUTRIS BIN WAGIMAN (Alm) ERWIN @ EWIN BIN SUKIMIN (Alm) SHOFYAN @ APAYAN BIN M. YAHYA DAUD (Alm)	CLANDESTINE LAB	KRISTAL METAMFETAMINA (SHABU) ACETON	674,96 (GRAM) 5000 MILITER	AKP. TRAH DJATI -IRWAN AFFANDI - BRIPKA. AUDY RIYANTO	PROSES PENYIDIKAN

04

KEGIATAN

Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

SASARAN

Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21

TARGET

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21

OUTPUT

Berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

CAPAIAN OUTPUT

27 Berkas P21

DIREKTORAT TPPU

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT TPPU DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2021

26 BERKAS P21

TARGET 22 BERKAS P-21
TERCAPAI 27 BERKAS P-21
122 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp.
12.364.348.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.
11.638.032.755,-
94,13 %

A. TARGET KEGIATAN TAHUN 2021

Tahun 2021 Direktorat TPPU selaku pembina fungsi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba mendapatkan total anggaran Rp. **12.364.348.000.-** (dua belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan target ouput sebanyak 23 (dua puluh tiga) berkas.

Adapun target ouput Direktorat TPPU sebanyak 26 (dua puluh enam) berkas dengan total anggaran sebesar Rp. **11.638.032.755.-** (sebelas milyar enam ratus juta tiga puluh delapan juta tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah), kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
TARGET OUTPUT TAHUN 2021

No	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	5355.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	
	5355.BCA.001	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Rp. 12.363.348.000.-
1	051	Pembinaan teknis penanganan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	103.200.000
2	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	11.354.718.000
3	053	Monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	905.430.000
TOTAL ANGGARAN			Rp. 12.363.348.000.-

	5355.PBE	Kegiatan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
	5355.PBE.001	Blueprint sistem informasi jaringan TPPU dalam penelusuran asset dan transaksi keuangan	1.000.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 12.364.348.000.-		12.364.348.000

Sedangkan 12 (dua belas) berkas target output didistribusikan kepada 10 (sepuluh) BNN Provinsi dengan total anggaran Rp. **2.217.559.000.-** (dua milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ratus ribu rupiah). Adapun sebaran anggaran dan target output sebagai berikut :

Tabel. 4.2
DISTRIBUSI TARGET OUTPUT DAN ANGGARAN TAHUN 2021

No	Kode	Kegiatan	Nama BNNP	Target	Jumlah Anggaran
1.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	BNNP SUMATERA UTARA	1 Berkas	Rp. 210.000.000.-
2.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	BNNP RIAU	1 Berkas	Rp. 93.872.000.-
3.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	BNNP SUMATERA SELATAN	1 Berkas	Rp. 210.000.000.-
4.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak	BNNP JAWA BARAT	1 Berkas	Rp. 210.000.000.-

No	Kode	Kegiatan	Nama BNNP	Target	Jumlah Anggaran
		pidana narkoba dan prekursor narkoba			
5.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP JAWA TENGAH	3 Berkas	Rp. 530.000.000.-
6.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP JAWA TIMUR	1 Berkas	Rp.173.687.000.-
7.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP KALIMANTAN BARAT	1 Berkas	Rp. 210.000.000,-
8.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP Jambi	1 Berkas	Rp. 160.000.000,-
9.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP Banten	1 Berkas	Rp. 210.000.000,-
10.	052	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	BNNP Kepulauan Riau	1 Berkas	Rp. 210.000.000,-
TOTAL				12 Berkas	Rp 2.217.559.000

Total target output dan anggaran tersebut target kinerja penyelidikan dan penyidikan TPPU terselesaikan (P-21) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas.

CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Dari 1 (satu) sasaran strategis tersebut target indikator kinerja yang telah ditentukan mempunyai capaian melebihi target yang telah ditentukan (*one Prestasi*). Disamping itu Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, antara lain operasional layanan perkantoran, perangkat olah data dan komunikasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, pelatihan tindak pidana pencucian Uang secara berjenjang dan perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan yang lebih baik.

Pada tahun 2021 Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target %
% Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terselesaikan.	22 berkas	27 Berkas	122 %
% Penyitaan Aset dan Harta kekayaan tersangka tindak pidana pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba	100 %	122 %	122 %
Jumlah Rata – Rata			122 %

Seluruh capaian diatas dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan secara simultan.

**Tabel 4.3
CAPAIAN TARGET OUTPUT**

No	Satker	Target	Capaian Ouput	Total Aset	Persentase
1	Direktorat TPPU	10 Berkas	17 Berkas	Rp. 105.233.293.961	
2	BNN Provinsi	12 Berkas	10 Berkas	Rp. 3.139.844.500	
TOTAL		22 Berkas	27 Berkas	Rp 108.373.138.461	122 %

Dimana Penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun 2021 mencapai 122 % (Seratus dua puluh dua persen)

dengan total asset tersita Rp. 108.373.138.461,- (seratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)Target Kinerja;

Target kinerja kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU yang terselesaikan (P-21) Tahun 2021 sebanyak 27 (dua puluh enam berkas, dimana capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel. 4.4
CAPAIAN TARGET KINERJA

Kegiatan	Target	Realisasi	Total Aset	Capaian Target %
Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 berkas	27 Berkas	Rp 108.373.138.461	122 %

Capaian kinerja kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU yang terselesaikan (P-21) sebesar 122% (enam puluh satu koma tujuh puluh dua persen) dengan total aset yang disita sebesar Rp108.373.138.461,- (seratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Perbandingan Capaian Kinerja TPPU 2019,2020,2021

Kegiatan	2019	2020	2021
Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak	43 berkas Perkara	21 Berkas Perkara	27 Berkas Perkara

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21			
Jumlah Aset yang di sita	Rp. 136.743.289.439	Rp. 86.022.409.817	Rp. 108.373.138.461

1) Penyerapan Anggaran;

Total anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun 2021 sebesar Rp. **108.373.138.461.-** (seratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagai berikut

Tabel 4.5
TOTAL ANGGARAN

No	Satker	Target	Pagu
1	Direktorat TPPU	17 Berkas	Rp 105.233.293.961
2	BNN Provinsi	10 Berkas	Rp. 3.139.844.500
TOTAL		27 Berkas	Rp 108.373.138.461

Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang adanya revisi anggaran, Adapun total anggaran yang telah direvisi sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPONEN		PAGU ANGGARAN	Realisasi
A	B	C	D		E	F
Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	001 Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	051	Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Rp. 103.200.000.-	74.837.750,-
			052	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	11.354.718.000	10.752.664.830

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPONEN	PAGU ANGGARAN	Realisasi
A	B	C	D	E	F
			Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Tindakan Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindakan Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	905.430.000	809.714.175
			Blueprint Sistem Informasi Jaringan TPPU dalam Penelusuran Asset	1.000.000	816.000
Jumlah				12.364.348.000	11.638.032.755

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui Penyerapan Anggaran Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mencapai 94.13 % dan adanya sisa anggaran sebesar Rp. **726.315.245** atau sekitar 5.87 %. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelidikan dan penyidik dapat dilakukan secara maksimal sekitar akhir tahun 2021 setelah adanya kelonggaran PSBB yang dilakukan oleh masing-masing wilayah yang ada di Indonesia;
2. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terhadap pegawai yang masuk 75 % dan WFH 25% sehingga dapat terjalan komunikasi dan koordinasi penyeleidikan dan penyidikan TPPU;

Sehingga guna meningkatkan kinerja Direktorat TPPU pada Tahun 2021 adapun hal-hal yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait dalam hal permintaan data;
2. Memaksimalkan penyelidikan dilapangan setelah adanya kelonggaran PSBB di masing-masing wilayah;
3. Memaksimalkan Analisa data guna mendapatkan bukti petunjuk untuk penyidikan.

05

KEGIATAN

Pelaksanaan Interdiksi, Wilayah Udara, Laut, darat dan Lintas Batas

SASARAN

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara ,laut,darat dan lintas batas wilayah Indonesia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21

TARGET

60 Berkas Perkara

OUTPUT

Berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21

CAPAIAN OUTPUT

64 Berkas P21

DIREKTORAT INTERDIKSI

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT INTERDIKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2021

64 BERKAS P21

TARGET 60 BERKAS PERKARA TERCAPAI 64 PETA JARINGAN 106,67 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp. 21.145.691.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.771.210.918,-
98,23 %

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Interdiksi telah memenuhi target dari yang telah ditentukan. Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Interdiksi juga melaksanakan Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yaitu 1) Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu, dan 2) Pembangunan Pos Interdiksi Terpadu di daerah. Pada tahun 2021 Direktorat Interdiksi telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	64 Berkas Perkara	106,67
2.	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Jumlah Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	7 Pos	7 Pos	100

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Interdiksi selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi.

Sasaran: Meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah *entry point* udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

tabel 5.2
Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah <i>entry point</i> udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	64 Berkas Perkara	106,67

Dari tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21. Merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Interdiksi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021, telah melaksanakan kegiatan Interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut/perairan, darat dan lintas batas dengan target yang ditetapkan 60 Berkas Perkara total kasus yang ditangani sebanyak 62 Berkas Perkara dan yang berhasil diselesaikan (P-21) sebanyak 64 Berkas Perkara.

Adapun rinciannya sebagai berikut : 33 Berkas Perkara capaian dari Subdit Udara, Laut/Perairan, dan 31 Berkas Perkara capaian dari Subdit

Darat dan Lintas Batas) dari yang ditargetkan pada TA. 2021 pada Direktorat Interdiksi sebanyak 60 berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas.

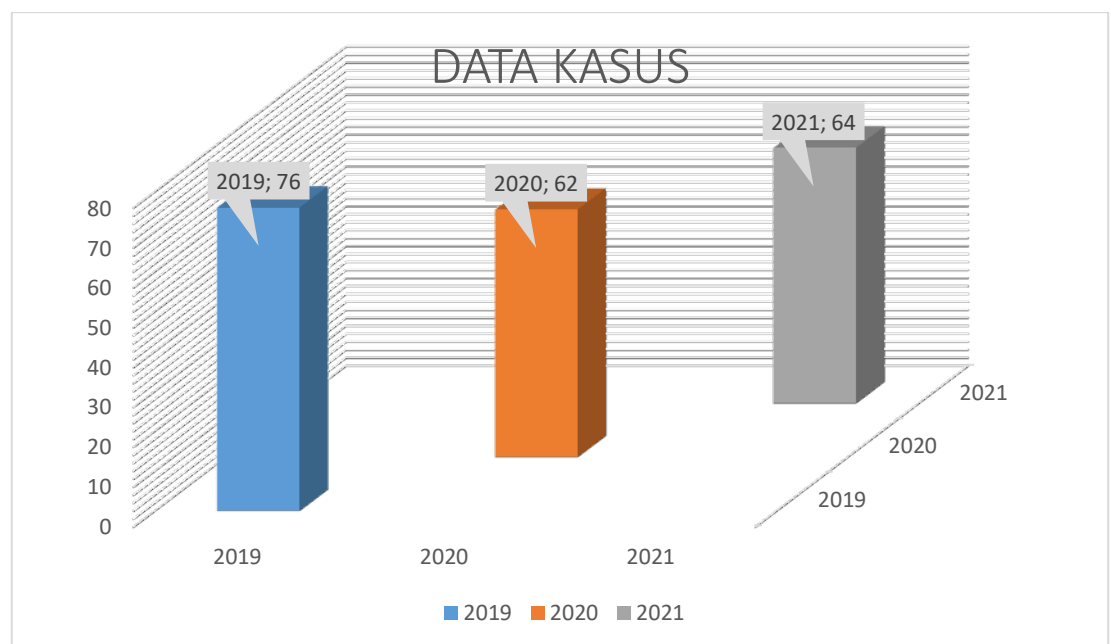
Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja kegiatan pada indikator kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka persentase capaian berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 mencapai 106,67%.

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2021

Grafik 1. Capaian jumlah berkas perkara tahun 2019 s.d. 2021 Direktorat Interdiksi



Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi peningkatan capaian dari 62 berkas perkara menjadi 64 berkas perkara pada tahun 2021.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target sebagai berikut:

1. Diawali dengan rencana penyusunan kegiatan yang matang, termasuk penyusunan Rencana Operasi (Renops) terkait operasi penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan instansi terkait untuk penguatan kegiatan P4GN;
3. Dalam mendukung sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), maka Direktorat Interdiksi melaksanakan Operasi Laut 2021 dengan sandi “Purnama” (Gempur Narkotika Bersama)
4. Dukungan anggaran dan peralatan teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
5. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang lebih profesional;
6. Peningkatan kekuatan antarpersonel yang menjadi lebih solid.

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi:

1. Terkendala dengan adanya pandemi Covid 19, dimana pelaksanaan tugas tidak dapat dilaksanakan dengan leluasa ke seluruh wilayah;
2. Pelaksanaan Interdiksi di wilayah yang belum optimal, dimana kegiatan interdiksi di wilayah masih harus mendapat pembinaan teknis dari pusat, selain itu juga;
3. Adanya keterbatasan SDM dan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Interdiksi yang menjangkau seluruh pintu masuk di seluruh wilayah Indonesia;
4. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan Operasi Interdiksi;

Langkah-langkah rekomendasi dan antisipatif yang diambil:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan;
2. Penguatan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain yang sudah terjalin serta menginisiasi kerja sama dengan lembaga/perusahaan/ instansi lain yang terkait dengan upaya P4GN, khususnya dengan perusahaan jasa ekspedisi, logistik dan pengiriman paket serta maskapai penerbangan;
3. Pertukaran data dan informasi melalui PKS/MoU;

4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Interdiksi dan jaringan intelijen dalam sistem dan sarana prasarana yang sudah dimiliki.

C.Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2021 pada Output 3252.001 mempunyai alokasi pagu (penyesuaian setelah refocusing) sebesar Rp. 21.145.691.000,- (dua puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2021 setelah Optimalisasi Anggaran

Kode	Output / Sub Output	Pagu Awal	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi	Sisa	% Capaian
3252.BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia					
051	Pembinaan Teknis Bidang Interdiksi	424,536,000	167,766,000	165,318,775	2,447,225	98.54%
053	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	13,158,540,000	8,295,121,000	8,283,193,890	11,927,110	99.86%

Kode	Output / Sub Output	Pagu Awal	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi	Sisa	% Capaian
054	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	6,181,280,000	3,447,160,000	3,444,181,156	2,978,844	99.91%
3252.RBM.001	Pos Interdiksi Terpadu yang Operasional					
051	Operasionalisasi Pos Interdiksi Terpadu	9,235,644,000	9,235,644,000	8,878,517,097	357,126,903	96.13%
TOTAL :		29,000,000,000	21,145,691,000	20,771,210,918	374,480,082	98.23%

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut di atas, Direktorat Interdiksi pada Tahun Anggaran 2021 terdapat sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 374.480.082,- (Tiga ratus juta tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan ratus).

06

KEGIATAN

Penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika ,prekursor narkotika dan TPPU

SASARAN

Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika ,prekursor narkotika dan TPPU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Persentase Tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap
2. Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap

TARGET

1. 100%
2. 100%

OUTPUT

1. Persentase Tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap
2. Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap

CAPAIAN OUTPUT

18 Tersangka DPO
34 Tersangka TO

DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENGEJARAN

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT
PENINDAKAN DAN PENGEJARAN DEPUTI BIDANG
PEMBERANTASAN TAHUN 2021**

18 TERSANGKA

34 TERSANGKA

1. TARGET 14 TERSANGKA DPO
TERCAPAI 18 TERSANGKA
2. DPO 128 %
3. TARGET 14 TERSANGKA TO
TERCAPAI 34 TERSANGKA TO
242 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp.
21.466.656.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.
21.459.919.535,-
99,97 %

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Tahun 2021 Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan penindakan maupun pengejaran kepada Target Operasi (TO) serta Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	Persentase Tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100 %	100 %
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100 %	100 %

2. Capaian Output Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	DPO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	14	18	129%
		Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	14	34	243%

3. Perbandingan Capaian Output Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2019,2020,2021

No	Sasaran Kegiatan	Output	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	DPO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	19	15	18
		Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	39	31	34

Sebagaimana tabel di atas dijelaskan bahwa Capaian Direktorat Penindakan dan Pengejaran dengan 2 (dua) Output yang menjadi ukuran capaian kinerja :

1. Jumlah tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap 18 (delapan belas) DPO.
2. Jumlah target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap 34 (tiga puluh empat).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian Direktorat Penindakan dan Pengejaran ini dipengaruhi oleh:

1. Pelaksanaan tugas oleh anggota di lapangan yang dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.
2. Dukungan peralatan teknologi intelijen dalam mengolah informasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis penindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas seluruh anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan.
4. Optimalisasi metode analisa data intelijen dan mensinergikan sumber daya baik yang ada di Direktorat Penindakan dan Pengejaran maupun antar Direktorat di bawah Deputi Bidang Pemberantasan.
5. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara BNN dengan Instansi terkait baik nasional maupun Internasional.
6. Memaksimalkan fungsi Unit K-9 di wilayah rawan Narkoba di seluruh Indonesia, sebagai pembina fungsi Unit K-9 Direktorat Penindakan dan Pengejaran menempatkan Unit K-9 di 14 Badan Narkoba Nasional Provinsi sebagai berikut:

B. Pengelolaan Kelompok Kerja K-9

Kegiatan Kelompok Kerja K-9 mencakup Persiapan Bahan Operasi K-9 dan pelaksanaan Operasi K-9 dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Pelatihan K-9

Kegiatan Pelatihan Satwa K-9 di dalam fasilitas Mako K9 sudah berjalan dengan baik, rutin, terprogram dan setiap bulan Satwa K9 melakukan latihan di luar Mako K-9 untuk meningkatkan kemampuannya sesuai kondisi operasional di lapangan.

2. Operasional K-9

Membantu pelaksanaan kegiatan pengungkapan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan melaksanakan tugas penyelidikan disertai pendeteksian barang diduga narkotika menggunakan satwa anjing pelacak (Unit K-9). Adapun rincian kegiatan operasional K-9 sebagai berikut :

Data keberhasilan pengungkapan K9 Direktorat Penindakan dan pengejaran

No	Tempat	Satwa	Barang Bukti Narkotika	Jumlah	Keterangan
1.	Jabar dan Banten	1. Aba 2. Boltik	Ganja	450 kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik
2.	Banten	1. Hunter 2. Purga	1. Sabu 2. Ganja	5 bks 41 bks	Barang bukti di serahkan ke penyidik
3.	DKI Jakarta	1. Timmy 2. Erica	Sabu	3 Kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik

No	Tempat	Satwa	Barang Bukti Narkotika	Jumlah	Keterangan
4.	Banten	Mac	Ganja	50 Kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik
5.	Banten	1. Chipi 2. Erica	Ganja	67 Kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik
6.	DKI Jakarta	1. Polka 2. James	Ganja	1 Kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik
7.	Lampung	Amber	Sabu	10 Kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik
8.	Jabar	1. Aba 2. Mila	Sabu	6 kg	Barang bukti di serahkan ke penyidik

3. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Khusus

Dengan adanya Manajemen yang baik dalam Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Khusus mendapatkan hasil penggunaan kendaraan yang termonitor, kendaraan selalu dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk operasional, serta administrasi pajak kendaraan dan pelaksanaan *service* berkala terlaksana tepat waktu.

4. Pemeliharaan dan Perawatan Kennel

Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan pembagian jadwal dan tim sehingga terciptanya lingkungan kennel yang bersih, rapi, dan kondusif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan satwa.

5. Manajemen Pakan

Kegiatan dan kinerja Manajemen Pakan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan prinsip First in First out serta berpedoman pada rekomendasi pemberian pakan oleh Medik Veteriner.

6. Medis

- a. Pemeriksaan kesehatan satwa dilakukan secara rutin sebagai pemetaan kondisi kesehatan satwa K-9.
- b. Data kesehatan yang didapat digunakan sebagai bahan analisa faktor-faktor penyebab penyakit pada satwa K-9 BNN, sehingga upaya pengendalian dan penanganan penyakit dapat dilakukan dengan lebih baik.
- c. Pemberian obat cacing secara rutin untuk mencegah adanya infeksi endoparasit (cacing) pada satwa K-9. Hal ini dibuktikan melalui tidak adanya kasus infeksi endoparasit selama periode 3 bulan setelah pemberian obat cacing pada satwa K-9.
- d. Pemberian obat kutu secara rutin untuk mencegah adanya infeksi ektoparasit (kutu) pada satwa K-9. Hal ini dibuktikan melalui tidak adanya kasus infeksi kutu selama periode 3 bulan setelah pemberian obat kutu pada satwa K-9.
- e. Vaksinasi rutin guna mencegah terjangkitnya penyakit *distemper*, hepatitis, *parvo*, *parainfluenza*, *leptospira*, dan rabies pada satwa K-9. Hal ini dibuktikan melalui tidak adanya kasus infeksi penyakit tersebut di atas selama periode setahun setelah pemberian vaksinasi.
- f. Pelaksanaan vaksinasi membantu dalam penugasan. Dalam hal ini menyangkut nilai protektif dalam uji titer antibodi rabies sebagai persyaratan penerbangan.

- g. Pelaksanaan preventif obat kutu dilakukan untuk mencegah terjadinya infestasi parasit pada satwa yang merupakan salah satu vektor penularan parasit darah

7. *Drugs Control Officer (DCO)*

Seluruh kegiatan pengelolaan barang bukti sebagai bahan latihan dengan pengelolaan bahan latihan sebagai berikut :

Jenis	Status	Perolehan	Jumlah
Sabu	Dipakai	Baru	182,5 gram
		Lama	63,5 gram
	Disimpan	Baru	622,4 gram
		Lama	117,5 gram
Ganja	Dipakai		111,2 gram
	Disimpan		24 gram
Ekstasi	Dipakai		1121,1 gram

8. Administrasi

Kegiatan administrasi dilaksanakan dengan dengan alur yang sistematis serta didukung dengan pengarsipan yang baik

9. Pengelolaan K-9 BNN Provinsi

a. Satwa K-9 BNN Provinsi

No.	BNN Provinsi	Nama Satwa	Ras/ Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Aceh	Rex 1	GSD/ Jantan	Kondisi sehat dan layak operasional
		Mateo	Labrador/ Jantan	Kondisi sehat dan layak operasional
2.	Sumatera Utara	Billy	Labrador/ Jantan	Memilik gangguan tulang belakang
		Morgan	Labrador/ Jantan	Kondisi sehat dan layak operasional
3.	Riau	Biggi	GSD/ Jantan	Baik dan sehat
		Mailon	Labrador/ Jantan	Baik dan sehat
4.	Kepulauan Riau	Jey	Labrador/ Jantan	Sehat dan layak operasional
		Thor	Labrador/ Jantan	Sehat dan layak operasional
5.	Sumatera Selatan	Daggi	GSD/ Jantan	Baik dan sehat
		Manny	GSD/ Jantan	Baik dan sehat

No.	BNN Provinsi	Nama Satwa	Ras/ Jenis Kelamin	Keterangan
6.	Lampung	Jessi	GSD/ Betina	Baik dan Sehat
		Tina	Malinois/ Betina	Baik dan Sehat
7.	Banten	Dexo	GSD/ Jantan	Baik
		Laika	Labrador/ Betina	Baik
8.	Jawa Barat	Barak	GSD/ Jantan	Baik dan sehat
		Axcel	Malinois/ Jantan	Baik dan sehat
9.	Jawa Tengah	Charlie	Malinois/ Jantan	Baik dan sehat
		Semir	GSD/ Jantan	Baik dan sehat
10.	Jawa Timur	Rony	GSD/ Jantan	Baik
		Pongky	Labrador/ Jantan	Baik
11.	Bali	Willem	GSD/ Jantan	Baik
		Baru	Labrador/ Jantan	Baik
12.	Kalimantan Timur	Tara 1	GSD/ Betina	Baik dan sehat
13.	Sulawei Selatan	Ben	GSD/ Jantan	Baik dan sehat
		Kani	Malinois/ Betinas	Baik dan sehat
14.	Jambi	Kato	Malinois/ Jantan	Satwa Kato Mengalami gangguan ginjal
		Sammy	GSD/ Jantan	Baik dan sehat

Dari 27 (dua puluh tujuh) satwa yang berada di BNN Provinsi 25 (dua puluh lima) satwa dalam kondisi baik, sehat dan siap melakukan operasi. Satu ekor satwa memiliki gangguan tulang belakang dan satu ekor mengalami gangguan ginjal.

b. Pegawai K-9 BNN Provinsi

No.	BNN Provinsi	Nama Pegawai	Jabatan	Keterangan
1.	Aceh	Teuku Farizi Mundzir	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Saepul Rahman	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
2.	Sumatera Utara	Alden Pulung Tarigan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Joni Prahata Rajagukguk	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Rinto Sianturi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
3.	Riau	Septian Fajar Prasetyo	Pelatih/ Pawang Hewan	PNS
		Indro Sunyoto	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Nasrul Simamora	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Raden Aditya Warman Putra	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
4.	Kepulauan Riau	Zefri Halim	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Rika Bustami	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
5.	Sumatera Selatan	Badrul Gali	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Dani Anggi Saputra	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Jaka Ardianto	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Yaumal Nurfalah	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
6.	Lampung	Sandra Laksono	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Kismono	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Dede Wahyu	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Octavianus Parrangan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
7.	Banten	Agus Wahyudi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
8.	Jawa Barat	Angga Ardiansyah	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Ari Nurhasan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		M Heru Ariwibowo	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Rendy Agus Setiawan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
9.	Jawa Tengah	Danang Joko	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Fitria Riyadi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		M. Furqon	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Yohanes Seno Aji	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
10.	Jawa Timur	Dendi Frediono	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Heri Iswanto	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Bagus Mahendra P.	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
11.	Bali	I Made Lanang Adi Nugraha	Pelatih/ Pawang Hewan	PNS
		Putu Gede Marta Setiawan	Pelatih/ Pawang Hewan	PNS
		Komang Mas Satriawan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
12.	Kalimantan Timur	Nurhaedi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
13.	Sulawesi Selatan	Januardi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Muchlis Winarno Ale Balu	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN

No.	BNN Provinsi	Nama Pegawai	Jabatan	Keterangan
14.	Jambi	Aulia Nugraha Putra	Pelatih/ Pawang Hewan	PNS
		Freddy Jasmerr Silalahi	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Kadek Juniarta Gunawan	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN
		Yusuf Bahtiar	Pelatih/ Pawang Hewan	PPNPN

Secara Ideal 1 (satwa) K-9 BNNP didampingi oleh 2 (dua) orang Pawang dengan perbandingan 1 (satu) orang PNS sebagai penanggung jawab dan 1 (satu) orang PPNPN sebagai pendukung. Dari 14 (empat belas) BNN Provinsi yang memiliki K-9 belum ada yang memenuhi kriteria tersebut. Untuk komposisi PNS dan PPNPN baru 3 (tiga) provinsi yang diperkuat dengan PNS.

c. Fasilitas K-9 BNN Provinsi

Secara umum fasilitas K-9 di BNN Provinsi telah tersedia, namun untuk beberapa BNN Provinsi masih mengalami keterbatasan dalam mengakomodasi kelayakan bagi satwa dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. BNN Provinsi Aceh
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Area umbaran telah tersedia
2. BNN Provinsi Sumatera Utara memiliki
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Belum memiliki lapangan umbaran.

3. BNN Provinsi Riau
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas dengan perawatan yang rutin
 - c. Bangunan kennel tergenang pada saat hujan / banjir
 - d. Area umbaran minim area rumput
4. BNN Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Area umbaran luas namun belum berpagar
5. BNN Provinsi Sumatera Selatan
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas dengan perawatan yang rutin
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Belum memiliki umbaran
6. BNN Provinsi Lampung
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel memiliki ukuran yang sempit dan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik.
 - d. Belum memiliki umbaran
7. BNN Provinsi Banten
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik.

- d. Belum memiliki umbaran namun ada area terbuka
- 8. BNN Provinsi Jawa Barat
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Area Umbaran telah tersedia
- 9. BNN Provinsi Jawa Tengah
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Belum memiliki umbaran
- 10. BNN Provinsi Jawa Timur
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel terdapat kerusakan pada pintu dan lantai
 - d. Area umbaran tersedia namun masih kekurangan area tanah
- 11. BNN Provinsi Jawa Bali
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Area umbaran tersedia namun ukuran terlalu sempit
- 12. BNN Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi

- b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik
 - d. Belum memiliki area umbaran
13. BNN Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel belum memiliki sirkulasi udara yang baik
 - d. Belum memiliki area umbaran
14. BNN Provinsi Jambi
- a. Fasilitas bangunan K-9 dalam area kantor BNN Provinsi
 - b. Kendaraan dinas baik dan terawat
 - c. Bangunan kennel dalam kondisi baik dan terawat
 - d. Belum memiliki area umbaran

1) Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2021

PROGRAM	KRO	RO	KOMPONEN	PAGU ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (Rp)	%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3261.BHB Operasi Bidang Keamanan	001	051 Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	8.185.243.000	8.179.437.268	99,93
		002	051 Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	497.750.000	497.743.498	100,00
			052 Penindakan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU yang Tertangkap	7.280.000.000	7.302.933.836	100,00
			053 Operasional Program Kelompok Kerja Pengelolaan K9	5.453.643.000	5.434.579.535	99,99
			054 Monitoring dan Evaluasi	50.020.000	45.225.400	99,99
Jumlah				21.466.656.000	21.459.919.537	99,97

Dari tabel tersebut di atas diketahui Penyerapan Anggaran Direktorat Penindakan dan Pengejaran pada tahun 2021 sejumlah Rp 21.459.919.537 atau sebesar 99,97 %.

07

KEGIATAN

Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

SASARAN

Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan
2. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

TARGET

1. 100%
2. 100%

OUTPUT

1. Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan
2. Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

CAPAIAN OUTPUT

99.45 Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan

100 Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

DIREKTORAT WASTAHTI

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT DIREKTORAT WASTAHTI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2021

100 Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan

100 NILAI TINGKAT KEAMANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON-NARKOTIKA

TARGET 100 TINGKAT KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN TAHANAN

TERCAPAI 99.45 %

TARGET 100 TINGKAT KEAMANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON-NARKOTIKA TERCAPAI 100 %

ANGGARAN

Setelah revisi ke 5 menjadi Rp. 15,954,811,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13,871,984,927

86.95%

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Wastahti telah memenuhi target dari yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 Direktorat Wastahti telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Kinerja Direktorat Wastahti Semester I T.A. 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	99,5
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Wastahti selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti.

SASARAN : MENINGKATNYA PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI.

Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Wastahti 2019,2020,2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	99.45
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100	100

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai tingkat Kemanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	99,45	99,45%
Nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %
Jumlah			

Metode Pengukuran

1) Tingkat Keamanan Tahanan

Maka Perhitungan indikator kinerja adalah:

a= jumlah tahanan yang kabur

b= jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c= jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100. Maka:

Indikator kinerja

$$\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% = 100 \longrightarrow \frac{1286 - (7+0+0)}{1286} \times 100\% = 99.45$$

2) Tingkat Keamanan Barang Bukti

Maka Perhitungan indikator kinerja adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh $a=1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a=0$
 a_1 = untuk barang bukti 1
 a_2 = untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100.

Maka:

Indikator kinerja:

$$\left[\frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100 = 100 \longrightarrow \left[\frac{107}{107} \times 100\% \right] \times 100 = 100$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Secara umum sasaran strategis pada Direktorat Wastahti adalah Kualitas layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba.

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan

Pada tahun 2021, Penyidik BNN dan BNNP telah menahan orang sebanyak 1286 orang yang terdiri dari:

- a. Laki- laki 1219 orang

b. Perempuan 67 orang

Adapun tahanan yang ditangkap dan ditahan di :

No	SATKER	TAHANAN	
		LAKI-LAKI	WANITA
1.	BNN RI	147	5
2.	BNNP NAD	40	4
3.	BNNP SUMUT	87	2
4.	BNNP SUMBAR	33	2
5.	BNNP RIAU	34	6
6.	BNNP KEPRI	34	1
7.	BNNPSUMSEL	45	-
8.	BNNP JAMBI	83	4
9.	BNNP BABEL	14	4
10.	BNNP LAMPUNG	17	-
11.	BNNP BENGKULU	28	-
12.	BNNP BANTEN	16	-
13.	BNNP JAWA BARAT	57	1
14.	BNNP JAWA TENGAH	35	2
15.	BNNPJAWA TIMUR	49	1
16.	BNNP DI YOGYAKARTA	23	1
17.	BNNP BALI	44	6
18.	BNNP NTT	4	-
19.	BNNP NTB	20	-
20.	BNNP KALIMANTAN BARAT	14	2
21.	BNNP KALIMANTAN TIMUR	41	3
22.	BNNP KALIMANTAN TENGAH	44	1
23.	BNNPKALIMANTAN SELATAN	33	8
24.	BNNP KALIMANTAN UTARA	24	-
25.	BNNP SULAWESI UTARA	20	1
26.	BNNP SULAWESI TENGAH	81	4
27.	BNNP SULAWESI TENGGARA	19	2
28.	BNNP SULAWESI SELATAN	40	2
29.	BNNP SULAWESI BARAT	35	2
30.	BNNP MALUKU	13	3
31.	BNNP MALUKU UTARA	13	-
32.	BNNP GORONTALO	12	-
33.	BNNP PAPUA BARAT	8	-
34.	BNNP PAPUA	12	-
	Jumlah	1219	67

Untuk kegiatan tahanan di BNNP DKI dan ditempatkan di Rutan BNN, di mana tahanan yang ditangkap dan ditahan di Rutan BNN sebanyak 27 orang terdiri dari 25 laki-laki 2 perempuan.

Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.OT.01.03 TAHUN 2020 Tentang Tempat Tahanan Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan) ruang tahanan yang sudah mendapat ijin operasional sebagai cabang Rumah Tahanan ada 3 BNNP yaitu:

1. BNNP Jawa Barat
2. BNNP Jawa Tengah
3. BNNP Jawa Timur

Sehingga saat ini BNN telah memiliki 20 ruang tahanan sebagai cabang Rutan. Adapun cabang rutan yang dimaksud adalah:

1. Rutan BNN cabang Rutan Klas I Cipinang
2. Rutan BNNP NAD cabang Rutan Klas II B Janto
3. Rutan BNNP Sumatera Utara cabang Rutan Klas I Medan
4. Rutan BNNP Kepulauan Riau cabang Rutan Klas I Siak Indrapura
5. Rutan BNNP Sumatera Selatan cabang Rutan Klas I Palembang
6. Rutan BNNP Kepulauan Babel cabang Rutan Sungai Liat di Muntok
7. Rutan BNNP Banten cabang Rutan Klas II B Serang
8. Rutan BNNP DIY cabang Rutan Klas II B Wonosari
9. Rutan BNNP Kaltim cabang Rutan Klas II B Samarinda
10. Rutan BNNP Kalteng cabang Rutan Klas II B Kuala Kapuas
11. Rutan BNNP Sulawesi Selatan cabang Rutan Klas I Makasar

12. Rutan BNNP Sulawesi Tengah cabang Rutan Klas II A Palu
13. Rutan BNNP Sulawesi Tenggara cabang Rutan Klas II A Kendari
14. Rutan BNNP Bali cabang Rutan Klas II B Bangli
15. Rutan BNNP NTB cabang Rutan Klas II B Selong
16. Rutan BNNP Maluku cabang Rutan Klas II A Ambon
17. Rutan BNNP Maluku Utara cabang Rutan Klas II B Ternate
18. Rutan BNNP Jawa Barat cabang Rutan Klas I Bandung
19. Rutan BNNP Jawa Tengah cabang Rutan Klas I Semarang
20. Rutan BNNP Jawa Timur cabang Rutan Klas I Surabaya

Ditahun 2021, ada tahanan yang melarikan diri yaitu di Ruang Tahanan BNNP Sumut pada tanggal 16 Mei 2021

Adapun tahanan yang melarikan diri yaitu:

BNNP Sumatera Utara

1. Rahmat Hidayatulloh LKN/04/II/2021/BNNP-SU
2. Zulfikar LKN/01/I/2021/BNNP-SU
3. Muhammad Junaidi LKN/55-NAR/IX/2020/BNN
4. Irwanda LKN/01/I/2021/BNNP-SU
5. Marzuki Ahmad LKN/02/II/2020/BNNP-SU
6. Salim Saragih LKN/04/II/2021/BNNP-SU

Dari 6 tahanan yang melarikan diri, 1 orang atas nama Salim Saragih tertangkap Kembali dan 1 orang menyerahkan atas nama Muhammad Junaidi

BNNP Sulawesi Tengah (BNNK Morowal)

1 orang tahanan melarikan diri atas nama Lk. Sarman Briyansyah Sundus Alias Ede pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wita dan tertangkap Kembali pada hari sabtu, 22 Mei 2021 pkl 09.00 Wita

di rumahnya di desa Pungkoilu kec. Bungku Tengah kemudian di bawa kembali ke kantor BNNK Morowal

Data TAT Tahun 2021

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
1	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	26	3	2	1
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	15	13	13	0
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	1	0		
4	BNN KABUPATEN BIREUEN	10	13		
5	BNNP SUMATERA UTARA	30	70		
6	BNN KABUPATEN KARO	6	2		
7	BNN KOTA BINJAI	4	5		
8	BNN KOTA TANJUNG BALAI	4	7		
9	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	0	0		
10	BNN KABUPATEN LANGKAT	8	4		
11	BNN KABUPATEN ASAHAN	8	2		
12	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	4	0		
13	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	8	11		
14	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	3	1		
15	BNN KOTA TEBING TINGGI	3	0		
16	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	30	0		
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	5	45		
18	BNN KOTA PEMATANGSIANTAR	5	34		
19	BNN KABUPATEN BATU BARA	5	21		
20	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	5	20		
21	BNNP SUMATERA BARAT	18	17		
22	BNN KOTA SAWAHLUNTO	4	0		
23	BNN KOTA PAYAKUMBUH	7	0		
24	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	5	24		
25	BNNP RIAU	40	123	94	18
26	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	1	19	0	19

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
27	BNN KABUPATEN PELALAWAN	15	22	17	5
28	BNN KOTA PEKANBARU	10	11	0	11
29	BNNP JAMBI	10	36	34	2
30	BNNKTANJUNG JABUNG TIMUR	3	3	3	0
31	BNN KABUPATEN BATANGHARI	2	2	0	2
32	BNNP SUMATERA SELATAN	3	0		
33	BNN KOTA PAGARALAM	0	0		
34	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	0	0		
35	BNNP LAMPUNG	3	58		
36	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	2	0		
37	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	0	0		
38	BNNK WAY KANAN	0	13		
39	BNN KOTA METRO	5	4	4	0
40	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	30	20	10
41	BNN KABUPATEN BANGKA	3	9	2	7
42	BNN KABUPATEN BELITUNG	3	6	5	1
43	BNNP KEPULAUAN RIAU	6	11	9	2
44	BNNP BENGKULU	10	0		
45	BNN KOTA BENGKULU	1	0		
46	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	0	0		
48	BNNP DKI JAKARTA	50	83	82	1
49	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	120	135	119	16
50	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	17	17	17	0
51	BNN KOTA JAKARTA UTARA	50	76	75	1
52	BNNP BANTEN	24	26	26	0
53	BNN KOTA CILEGON	6	6		
54	BNNP JAWA BARAT	57	70	62	8
55	BNN KABUPATEN BOGOR	1	0		
56	BNN KABUPATEN CIANJUR	2	1		
57	BNN KOTA CIREBON	0	0		
58	BNN KOTA CIMAHI	2	0		

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
59	BNN KABUPATEN KUNINGAN	0	18	16	2
60	BNN KABUPATEN SUKABUMI	5	8		
61	BNN KABUPATEN GARUT	2	2		
62	BNN KOTA DEPOK	3	0		
63	BNN KABUPATEN KARAWANG	5	10		
64	BNN KOTA TASIKMALAYA	6	1		
65	BNN KABUPATEN SUMEDANG	4	2		
66	BNNP JAWA TENGAH	40	97		
67	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	10	1		
68	BNN KOTA TEGAL	10	9		
69	BNN KABUPATEN BANYUMAS	3	15		
70	BNN KABUPATEN CILACAP	2	5		
71	BNN KABUPATEN KENDAL	8	12		
72	BNN KABUPATEN BATANG	8	17		
74	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	10	11		
75	BNN KABUPATEN MAGELANG	1	1		
76	BNN KOTA SURAKARTA	5	34		
77	BNNP DIY	40	22	4	18
78	BNN KABUPATEN SLEMAN	10	11	2	9
79	BNN KABUPATEN BANTUL	5	3	0	3
80	BNNP JAWA TIMUR	240	199	131	68
81	BNN KOTA SURABAYA	0	20	20	0
82	BNN KOTA MOJOKERTO	10	12	1	11
83	BNN KOTA MALANG	20	4		
84	BNN KOTA BATU	10	10	3	7
85	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	5	5	5	0
86	BNN KABUPATEN NGANJUK	20	31	3	28
87	BNN KOTA KEDIRI	0	3	1	2
88	BNN KABUPATEN MALANG	13	10	3	7
89	BNN KABUPATEN GRESIK	15	20	0	20
90	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	6	9	9	0
91	BNN KABUPATEN SIDOARJO	0	6	5	1

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
92	BNN KABUPATEN KEDIRI	0	3		
93	BNN KABUPATEN SUMENEP	3	8	0	8
94	BNN KABUPATEN LUMAJANG	3	4	4	0
95	BNN KABUPATEN BLITAR	25	26	3	23
96	BNN KABUPATEN TUBAN	10	10	0	0
97	BNNP KALIMANTAN BARAT	40	27	26	1
98	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	3	3	0	3
99	BNN KABUPATEN SINTANG	0	0		
100	BNN KOTA PONTIANAK	5	3	2	1
101	BNN KOTA SINGKAWANG	5	2	2	0
102	BNN KABUPATEN SANGGAU	0	0		
104	BNN KABUPATEN MEMPWAH	0	0		
105	BNNP KALIMANTAN TENGAH	15	16	12	4
106	BNN KOTA PALANGKA RAYA	10	10	9	1
107	BNNP KALIMANTAN SELATAN	20	7	5	2
108	BNN KOTA BANJARMASIN	2	0	0	0
109	BNN KOTA BANJARBARU	7	2	0	2
110	BNN KAB HULU SUNGAI SELATAN	0	4		
111	BNN KABUPATEN TABALONG	0	0		
112	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	2	1	1	0
113	BNNP KALIMANTAN TIMUR	20	41	29	12
114	BNN KOTA BALIKPAPAN	19	19	9	10
115	BNN KOTA SAMARINDA	8	9	3	6
116	BNN KOTA BONTANG	0	0	0	0
117	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0
118	BNN KOTA TARAKAN	2	11	9	2
119	BNN KABUPATEN NUNUKAN	10	21	21	0
120	BNNP SULAWESI UTARA	20	32		
121	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	1	0		
122	BNN KOTA BITUNG	2	0		
123	BNN KOTA MANADO	7	9	9	

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
124	BNNP SULAWESI TENGAH	16	16	6	10
125	BNN KABUPATEN MOROWALI	2	0		
126	BNN KOTA PALU	50	0		
127	BNN KABUPATEN DONGGALA	3	6		
128	BNN KABUPATEN POSO	8	3		
130	BNNP SULAWESI SELATAN	125	427		
131	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	25	15		
132	BNN KABUPATEN BONE	10	82		
133	BNN KOTA PALOPO	2	74		
134	BNNP SULAWESI TENGGARA	30	26	21	5
135	BNN KABUPATEN MUNA	10	12	2	10
136	BNN KABUPATEN KOLAKA	6	3	2	7
137	BNN KOTA KENDARI	3	3	3	0
138	BNN KOTA BAU-BAU	5	6	3	3
139	BNNP SULAWESI BARAT	28	52		
140	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	25	22		
141	BNNP MALUKU	80	102	9	93
142	BNN KOTA TUAL	7	6		
143	BNNP MALUKU UTARA	18	42	38	4
144	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	0	0		
145	BNNP BALI	190	190	41	149
146	BNN KABUPATEN BADUNG	20	6		
147	BNN KABUPATEN GIANYAR	15	15		
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	65	76	44	32
150	BNN KOTA MATARAM	5	8	3	5
151	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	9	26	2	18
152	BNN KABUPATEN BELU	0	0		
153	BNN KABUPATEN KUPANG	5	0		
154	BNNP GORONTALO	40	39		
155	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	3	19		
156	BNNP PAPUA	20	7		

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	REHAB	REHAB REKOM PROSES PENYIDIKAN
157	BNN KABUPATEN MIMIKA	8	0		
158	BNN KABUPATEN JAYAPURA	5	0		
159	BNNP PAPUA BARAT	15	18		
TOTAL		2271	3230	1105	691

2. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Barang Bukti

Dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan barang bukti pada tahun 2021, Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang sitaan BNNP di sajikan pada table berikut :

DATA BARANG BUKTI YANG DISITA TAHUN 2021 PADA BNNP

NO	BNNP	BARANG BUKTI											
		SABU (gram)	GANJA (gram)	EKSTASI (butir)	GANJA SINETI S (gram)	KOPI GANJ A (gram)	TEMBAK AU GORILA (gram)	POH ON GAN JA (bata ng)	2-CB	DMT	BIJI GAN JA (gra m)	CAIRAN PREKU RSOR (ml)	MDMB- 4-en PINACA (gram)
1	BNN	2.266.844,03	536.841,77	109.952,00								4.250,00	1.001,70
2	BNNP ACEH	42.397,42	135.500,00	7,00	3,94	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	BNNP SUMUT	101.274,97	25.314,45	62.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	BNNP SUMBAR	5.876,69	121.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	BNNP SUMSEL	24.228,85	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	BNNP RIAU	4.206,04	147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00		
7	BNNP JAMBI	2.297,06	45.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	BNNP BENGKULU	56,48	142.121,00	0,00	0,00	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	BNNP KEPRI	23.163,20	14.593,77	11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	BNNP BABEL	1.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	BNNP LAMPUNG	10.475,89	300.923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	BNNP JAWA BARAT	9.096,83	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	BNNP BANTEN	9.620,34	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
14	BNNP DIY	229,90	300,60	0,00	0,00	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	BNNP BALI	593,78	107.300,98	204,00	22,23	0,00	108,00	2,00	0,00	990,84	0,00		
16	BNNP NTB	3.902,36	686,64	0,00	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	0,00		

NO	BNNP	BARANG BUKTI											
		SABU (gram)	GANJA (gram)	EKSTASI (butir)	GANJA SINTETI S (gram)	KOPI GANJ A (gram)	TEMBAK AU GORILA (gram)	POH ON GAN JA (bata ng)	2-CB	DMT	BIJI GAN JA (gra m)	CAIRAN PREKU RSOR (ml)	MDMB- 4-en PINACA (gram)
17	BNNP KALTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	BNNP KALTIM	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	BNNP JATENG	6.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	BNNP KALSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	BNNP KALBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	BNNP JATIM	8.152,37	11.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	BNNP NTT	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
24	KALIMANTAN TENGAH	4.939,63	990,60	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,06		
25	SULAWESI SELATAN	12.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	SULAWESI UTARA	1.186,87	3.886,64	0,00	3.035,0 0	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	SULAWESI BARAT	780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	SULAWESI TENGAH	1.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	SULAWESI TENGGARA	6.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	GORONTALO	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	MALUKU UTARA	167,56	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	MALUKU	200,42	4.159,07	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NO	BNNP	BARANG BUKTI											
		SABU (gram)	GANJA (gram)	EKSTASI (butir)	GANJA SINETI S (gram)	KOPI GANJ A (gram)	TEMBAK AU GORILA (gram)	POH ON GAN JA (bata ng)	2-CB	DMT	BIJI GAN JA (gra m)	CAIRAN PREKU RSOR (ml)	MDMB- 4-en PINACA (gram)
33	PAPUA BARAT	9,90	8.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	PAPUA	18,97	3.740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.547.106,79	1.775.605,71	184.510,00	3.196,48	44,00	582,69	7,00	1,26	1.179,88	0,13	4.250,00	1.001,70

Sumber : Puslitdatin BNN 2021

DATA MUSNAH TAHUN 2021

No	LKN	TANGGAL PEMUSNAHAN	JENIS				
			SABU (gram)	EKSTASI (Butir)	GANJA (gram)	MDMB-4-en-PINACA (gram)	CAIRAN PREKURSOR (ml)
1	LKN/67-INTD/XI/2020/BNN	Musnah 1 (8 Januari 2021)	52,043.00				
2	LKN/70-INTD/XI/2020/BNN	Musnah 1 (8 Januari 2021)	315.20				
3	LKN/074-P2/XI/2020/BNN	Musnah 1 (8 Januari 2021)	21,197.00	10,000.00			
4	LKN/08/XI/2020/BNNP DKI	Musnah 2 (24 Februari 2021)			4,814.78		
5	LKN/10/XII/2020/BNNP DKI	Musnah 2 (24 Februari 2021)			110,029.14		
6	LKN/11/XII/2020/BNNP DKI	Musnah 2 (24 Februari 2021)	79.47		10.78		
7	LKN/75-P2/XII/2020/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	5,870.76	238.00	15,157.08		
8	LKN/02-NAR/II/2021/BNN	Musnah 2 (24 Februari 2021)	10,622				
9	LKN/03-INTD/I/2021/BNN	Musnah 2 (24 Februari 2021)	42,353				
10	LKN/02/1/2021/BNNP DKI	Musnah 2 (24 Februari 2021)			1,010.24		
11	LKN/05-INTD/I/2021/BNN	Musnah 2 (24 Februari 2021)	31,533				
12	LKN/13-NAR/II/2021/BNN	Musnah 3 (22 April 2021)	2,003.00				
13	LKN/16-NAR/II/2021/BNN	Musnah 3 (22 April 2021)	2,484.18				

No	LKN	TANGGAL PEMUSNAHAN	JENIS				
			SABU (gram)	EKSTASI (Butir)	GANJA (gram)	MDMB-4-en-PINACA (gram)	CAIRAN PREKURSOR (ml)
14	LKN/06-P2/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	176,910.50	54,427.00			
15	LKN/09-INTD/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	15,490.50				
16	LKN/10-INTD/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	10,356.00				
17	LKN/12-P2/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	1,989.91				
18	LKN/11-P2/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	435,657.50				
19	LKN/14-INTD/II/2021/BNN RI	Musnah 4 (26 April 2021)			399,787.91		
20	LKN/15-INTD/II/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	194.10				
21	LKN/03/III/2021/BNNP DKI	Musnah 4 (26 April 2021)	6,486.96				
22	LKN/19-INTD/III/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	8,837.50				
23	LKN/04/II/2021/BNNP DKI	Musnah 4 (26 April 2021)	722.80				
24	LKN/20-INTD/III/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	73,457.50				
				35,850.00			
25	LKN/21-INTD/III/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	2,070.40				
26	LKN/22-NAR/III/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	6,264.00				
27	LKN/18-INTD/III/2021/BNN	Musnah 4 (26 April 2021)	60.00				
28	LKN/07/III/2021/BNNP DKI	Musnah 5 (25 Mei 2021)	5,150.98				
					22,333.62		
29	LKN/08/III/2021/BNNP DKI	Musnah 5 (25 Mei 2021)	94.96				
30	LKN/23-P2/III/2021/BNN	Musnah 5 (25 Mei 2021)	31,802				

No	LKN	TANGGAL PEMUSNAHAN	JENIS				
			SABU (gram)	EKSTASI (Butir)	GANJA (gram)	MDMB-4-en-PINACA (gram)	CAIRAN PREKURSOR (ml)
31	LKN/24-P2/III/2021/BNN	Musnah 5 (25 Mei 2021)	4,235.00				
				19,675.00			
32	LKN/27-INTD/IV/2021/BNN	Musnah 5 (25 Mei 2021)	94,884.00				
33	LKN/26-INTD/IV/2021/BNN	Musnah 5 (25 Mei 2021)	77,595				
34	LKN/28-INTD/IV/2021/BNN RI	Musnah 5 (25 Mei 2021)	536,424.00				
35	LKN/29-INTD/IV/2021/BNN	Musnah 5 (25 Mei 2021)	26,640.00				
36	LKN/30-INTD/IV/2021/BNN RI	Musnah 5 (25 Mei 2021)	17,798.00				
37	LKN/32-INTD/V/2021/BNN	Musnah 6 (28 Juni 2021)	3,199				
38	LKN/10/V/2021/BNNP DKI	Musnah 6 (28 Juni 2021)	378.87				
39	LKN/33-P2/VI/2021/BNN	Musnah 7 (25 Agustus 2021)	7,898				
40	LKN/11/VII/2021/BNNP DKI	Musnah 7 (25 Agustus 2021)	4,053.52				
41	LKN/35-NAR/VIII/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	105,461.30				
42	LKN/36-INTD/VIII/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	218,603.20				
43	LKN/12/VIII/2021/BNNP DKI	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	2,219.22				
44	LKN/37-INTD/IX/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	21,267.89				
45	LKN/39-INTD/IX/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)			113,710		
46	LKN/13/IX/2021/BNNP DKI	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	1,010.94				
47	LKN/14/IX/2021/BNNP DKI	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	107.67				
48	LKN/42-NAR/IX/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	105,826				
49	LKN/44-P2/X/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)	10,509				

No	LKN	TANGGAL PEMUSNAHAN	JENIS				
			SABU (gram)	EKSTASI (Butir)	GANJA (gram)	MDMB-4-en-PINACA (gram)	CAIRAN PREKURSOR (ml)
50	LKN/32A-NAR/IX/2021/BNN	Musnah 8 (19 Oktober 2021)				1,001.70	
51	LKN/25-INTD/IV/2021/BNN RI	Musnah 9 (30 Desember 2021)	2,178.28				
52	LKN/48-P2/X/2021/BNN	Musnah 9 (30 Desember 2021)	661.96				
							4,250
53	LKN/49-INTD/X/2021/BNN	Musnah 9 (30 Desember 2021)	7,802				
54	LKN/15/X/2021/BNNP DKI	Musnah 9 (30 Desember 2021)	25.09				
55	LKN/53-INTD/XI/2021/BNN		16,045.00				
56	LKN/02/XI/2021/BNNK-JU	Musnah 9 (30 Desember 2021)	502.30				
57	LKN/54-INTD/XI/2021/BNN	Musnah 9 (30 Desember 2021)	103,202.00				
58	LKN/55-INTD/XI/2021/BNN		33,776.00				
TOTAL			2,346,349.46	120,190.00	666,853.55	1,001.70	4,250.00

A. Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2021 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 4.409.280.000,- (empat milyar empat ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terserap sebesar 4,238,084,252 . pada unit kerja BNNP dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Realisasi anggaran pengawasan tahana barang bukti tahun 2021

No	Output Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1.	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan BNN	4,409,280,000	4,238,084,252	93.72%
2	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP NAD	308,735,000	266,296,500	86.254
3	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sumatera Utara	663,850,000	615,799,021	92.762
4	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sumatera Barat	302,435,000	260,914,190	86.271
5	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Riau	339,080,000	220,314,851	64.974

No	Output Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
6	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika Kepulauan Riau	294,050,000	178,344,000	60.651
7	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Jambi	262,040,000	252,785,247	96.468
8	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sumatera Selatan	248,745,000	241,390,400	97.043
9	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kepulauan Bangka Belitung	177,580,000	174,213,600	98.104
10	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Bengkulu	156,227,000	133,625,650	85.533
11	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Lampung	221,770,000	210,910,000	95.103
12	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP DKI Jakarta	458,107,000	333,222,000	72.739
13	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Banten	297,330,000	181,326,000	60.985
14	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Jawa Barat	452,068,000	403,066,991	89.161

No	Output Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
15	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Jawa Tengah	555,110,000	530,972,501	95.652
16	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP DI Yogyakarta	286,665,000	163,638,400	57.083
17	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Jawa Timur	902,470,000	747,567,452	82.836
18	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Bali	530,751,000	488,119,000	91.968
19	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP NTB	338,790,000	301,275,000	88.927
20	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika NTT	158,240,000	72,316,000	45.700
21	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kalimantan Barat	254,325,000	109,125,900	42.908
22	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kalimantan Tengah	268,525,000	245,152,744	91.296
23	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kalimantan Timur	440,365,000	364,490,760	82.770

No	Output Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
24	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kalimantan Selatan	344,900,000	257,482,500	74.654
25	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Kalimantan Utara	206,234,000	164,604,500	79.814
26	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sulawesi Tengah	187,439,000	158,612,601	84.621
27	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Gorontalo	232,825,000	212,799,125	91.399
28	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sulawesi Tengah	403,995,000	346,580,081	85.788
29	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sulawesi Barat	326,405,000	323,439,000	99.091
30	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sulawesi Selatan	575,200,000	575,172,500	99.995
31	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Sulawesi Tenggara	338,455,000	264,279,861	78.084
32	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Maluku	282,625,000	230,742,300	81.643

No	Output Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
33	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Maluku Utara	227,320,000	129,486,000	56.962
34	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Papua Barat	126,525,000	115,604,000	91.369
35	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika BNNP Papua	376,350,000	360,232,000	95.717
	TOTAL	15,954,811,000	13,871,984,927	86.945

Total anggaran yang di distribusikan secara nasional Rp.15,954,811,000 (lima belas milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) Dari seluruh anggaran yang terserap pada pada kegiatan Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika hanya mencapai Rp. 13,871,984,927. (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 86.94 % dari anggaran Rp.15,954,811,000 (lima belas milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang tersedia pada Tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 mengalami pandemic corona yang mengakibatkan kegiatan Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika terhambat.

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2021, Deputi Bidang Pemberantasan memiliki pagu anggaran sebesar **136.346.582.000 (serratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**. Dengan pembagian anggaran untk wilayah dan kantor pusat dengan komposisi :

- Anggaran kantor pusat : **Rp. 78.605.803.000,-** (tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima delapan ratus tiga ribu rupiah)
- Anggaran BNNP : **Rp. 57.740.779.000,-** (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Untuk dipa kantor pusat dilakukan revisi anggaran sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Revisi Anggaran Deputi Bidang Pemberantasan T.A 2021

NO	DIREKTORAT	DIPA AWAL	REVISI 01	REVISI 02	REVISI 03	REVISI 04	REVISI 05	REALISASI	SISA	%
1	Direktorat Intelijen	59.733.606.000	52.043.667.000	51.548.484.000	48.640.508.000	48.640.508.000	48.640.508.000	48.453.325.700	187.182.300	99,62
2	Direktorat Narkotika	21.951.220.000	20.625.552.000	17.667.200.000	16.281.549.000	16.081.549.000	16.081.549.000	15.083.999.949	997.549.051	93,80
3	Direktorat Interdiksi	29.000.000.000	25.743.020.000	22.645.690.000	21.145.691.000	21.145.691.000	21.145.691.000	20.771.210.918	374.480.082	98,23
4	Direktorat Psikotropika dan Prekursor	6.898.530.000	6.498.530.000	6.498.530.000	6.198.530.000	6.198.530.000	6.198.530.000	6.167.470.000	31.060.000	99,50
5	Direktorat TPPU	19.303.461.000	16.364.348.000	13.864.348.000	12.364.348.000	12.364.348.000	12.364.348.000	11.638.032.755	726.315.245	94,13
6	Direktorat Penindakan dan Pengejaran	64.557.863.000	61.965.106.000	24.377.177.000	21.466.656.000	21.466.656.000	21.466.656.000	21.459.919.535	6.736.465	99,97
7	Direktorat Wastahti	5.228.834.000	5.179.966.000	4.729.281.000	4.409.280.000	4.409.280.000	4.409.280.000	4.237.084.252	172.195.748	96,09
8	Dukungan Manajemen	6.040.020.000	6.040.020.000	6.040.020.000	6.040.020.000	6.040.020.000	6.040.020.000	5.781.726.697	258.293.303	95,72
Jumlah		212.713.534.000	194.460.209.000	147.370.730.000	136.546.582.000	136.346.582.000	136.346.582.000	133.592.769.806	2.753.812.194	97,98

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 7 (Tujuh) Direktorat seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.11

Anggaran pada Deputi Bidang Pemberantasan tahun 2021

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Direktorat Intelijen	48.640.508.000	REV.1, 2, dan 3
2.	Direktorat Narkotika	16.081.549.000	REV.1, 2, 3, dan 4
3.	Direktorat Interdiksi	21.145.691.000	REV.1, 2, dan 3
4.	Direktorat Psikotropika dan Prekursor	6.198.530.000	REV.1, 2, dan 3
5.	Direktorat TPPU	12.364.348.000	REV.1, 2, dan 3
6.	Direktorat Penindakan dan Pengejaran	21.466.656.000	REV.1, 2, dan 3
7.	Direktorat Wastahti	4.409.280.000	REV.1, 2, dan 3
8.	Dukungan Manajemen	6.040.020.000	-

Tabel 7.12

Realisasi penggunaan anggaran pada Deputi Bidang Pemberantasan tahun
2021

No.	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1.	Direktorat Intelijen	48.640.508.000	48.453.325.700	187.182.300	99,62
2.	Direktorat Narkotika	16.081.549.000	15.083.999.949	997.549.051	93,80
3.	Direktorat Interdiksi	21.145.691.000	20.771.210.918	374.480.082	98,23
4.	Direktorat Psikotropika dan Prekursor	6.198.530.000	6.167.470.000	31.060.000	99,50
5.	Direktorat TPPU	12.364.348.000	11.638.032.755	726.315.245	94,13
6.	Direktorat Penindakan dan Pengejaran	21.466.656.000	21.459.919.535	6.736.465	99,97
7.	Direktorat Wastahti	4.409.280.000	4.237.084.252	172.195.748	96,09
8.	Dukungan Manajemen	6.040.020.000	5.781.726.697	258.293.303	95,72
Jumlah		136.346.582.000	133.592.769.806	2.753.812.194	97,98

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.753.812.194,- (**dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus duabelas ribu serratus Sembilan puluh empat rupiah**) atau anggaran terserap sebesar 97,98 %.

BAB IV

P E N U T U P

IV. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum target kinerja Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2021 dapat walaupun terkendala oleh Pandemi Covid 19, akan tetapi seluruh keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dicapai karena beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Efisiensi Penggunaan anggaran.
 - b. Efektifitas pelaksanaan tugas oleh anggota di lapangan.
 - c. Dukungan *teknologi intelijen* dan *human intelijen*.
 - d. Metode analisa data intelijen dan mensinergikan sumber daya yang ada di masing-masing Direktorat.
 - e. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara BNN dengan Instansi terkait baik nasional, regional maupun Internasional.
2. Walaupun akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pemberantasan secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian tersebut, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyidik, penyidik, dan analis intelijen melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Menambah dan melengkapi peralatan intelijen untuk mengimbangi modus operandi yang berkembang.
 - c. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan

penyelidikan dan penyidikan, operasionalisasi posko Interdiksi, operasionalisasi koneksi jaringan telekomunikasi.

- d. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak di lapangan.
- e. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. menambah fasilitas dan meningkatkan fasilitas rumah tahanana negara cabang yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional.

IV.2 SARAN.

Dengan efisiensi anggaran yang ada, kinerja Deputy Pemberantasan secara umum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Namun bukan berarti bahwa kerja Deputy Pemberantasan tidak menemui hambatan. Untuk kedepan hambatan dirasakan akan semakin besar seperti modus operandi yang semakin bervariasi, penggunaan teknologi yang canggih dan pendanaan yang besar oleh jaringan sindikat narkoba dalam menjalankan bisnisnya, sehingga sarana, prasarana, kuantitas dan kualitas SDM para penyelidik dan penyidik Deputy Pemberantasan harus dioptimalkan tentunya dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

Paraf :

1. Kasi evalap : ...
2. Kasi rentek : ...
3. Kasubag TU : ...
4. Kasubdit Rentekva :

**Pit. DEPUTI PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Drs. Kenedy S.H., M.M

penyelidikan dan penyidikan, operasionalisasi posko Interdiksi, operasionalisasi koneksi jaringan telekomunikasi.

- d. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak di lapangan.
- e. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. menambah fasilitas dan meningkatkan fasilitas rumah tahanana negara cabang yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional.

IV.2 SARAN.

Dengan efisiensi anggaran yang ada, kinerja Deputy Pemberantasan secara umum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Namun bukan berarti bahwa kerja Deputy Pemberantasan tidak menemui hambatan. Untuk kedepan hambatan dirasakan akan semakin besar seperti modus operandi yang semakin bervariasi, penggunaan teknologi yang canggih dan pendanaan yang besar oleh jaringan sindikat narkoba dalam menjalankan bisnisnya, sehingga sarana, prasarana, kuantitas dan kualitas SDM para penyelidik dan penyidik Deputy Pemberantasan harus dioptimalkan tentunya dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

**Pit. DEPUTI PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Drs. Kenedy S.H., M.M